



RENCANA STRATEGIS

DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH
KOTA BEKASI
TAHUN 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025–2029 ini dapat disusun dengan baik.

Penyusunan Renstra ini merupakan wujud pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029, yang menekankan pentingnya keselarasan perencanaan antara pusat dan daerah dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta agenda prioritas pembangunan nasional.

Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi arah kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Disarpusda Kota Bekasi. Penyusunan Renstra ini dilakukan secara partisipatif dan berbasis pada data dan informasi yang relevan serta memperhatikan dinamika dan tantangan pembangunan ke depan.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, mulai dari tahapan penyusunan data, analisis permasalahan, hingga penyusunan program dan kegiatan strategis.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih perlu penyempurnaan, baik dari segi substansi maupun implementasi. Oleh karena itu, masukan dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan pelaksanaan pembangunan ke depan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra ini dapat menjadi pedoman strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Disarpusda Kota Bekasi dalam lima tahun ke depan, serta memberi kontribusi nyata dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Bekasi, 19 September 2025

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BEKASI



Ir. LUSIANA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196809201995032002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Landasan Hukum.....	3
I.3 Maksud dan Tujuan	6
I.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	9
II.1 Gambaran Pelayanan.....	9
II.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	35
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	45
III.1 Tujuan Renstra.....	45
III.2 Sasaran Renstra.....	49
III.3 Strategi Disarpusda.....	55
III.4 Arah Kebijakan Disarpusda.....	61
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	63
BAB V PENUTUP.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kelompok pegawai menurut fungsi.....	14
Tabel 2.2	Komposisi pegawai menurut pendidikan.....	14
Tabel 2.3	Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ruang.....	15
Tabel 2.4	Komposisi pegawai menurut status kepegawaian.....	15
Tabel 2.5	Sarana dan prasarana Dinas Arsip dan Perpustakaan	16
Tabel 2.6	Volume arsip urusan kearsipan.....	18
Tabel 2.7	Jumlah koleksi buku urusan perpustakaan....	19
Tabel 2.8	Data sistem Informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan.....	19
Tabel 2.9	Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024.....	22
Tabel 2.10	Kinerja Pelayanan Urusan Kearsipan.....	24
Tabel 2.11	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2019-2023.....	29
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2020-2024.....	30
Tabel 2.13	Identifikasi Permasalahan Disarpusda.....	36
Tabel 2.14	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD.....	42
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Disarpusda	53
Tabel 3.2	Penahapan Renstra Disarpusda.....	60
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Disarpusda.....	61
Tabel 4.1	Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disarpusda	65
Tabel 4.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Program, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Disarpusda.....	84
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama Disarpusda	101
Tabel 4.5	Formulasi Perhitungan IKU Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2030.....	102
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disarpusda.....	105
Tabel 4.7	Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan.....	106
Tabel 4.8	Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa.....	107
Tabel 4.9	Indikator Kinerja Program Disarpusda yang Mengacu Pada RPJMD Tahun 2025-2020.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	21
Gambar 2.2	Variabel dan Indikator Monitoring dan Evaluasi Kearsipan.....	32
Gambar 3.1	Konsep Renstra Disarpusda.....	54
Gambar 4.1	Kerangka Perumusan Program/Kegiatan /Subkegiatan Renstra PD	64

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan jangka menengah perangkat daerah yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan selama periode lima tahun. Penyusunan Renstra ini merupakan mandat dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang mengintegrasikan arah kebijakan nasional dengan kebutuhan dan prioritas daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Dalam mengatur dan mengurus Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah, terdapat urusan pemerintahan konkuren yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan, dalam hal ini perpustakaan dan kearsipan termasuk urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar.

Urusan Perpustakaan memiliki peran dan fungsi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyelenggaraan perpustakaan yang mampu memberikan peran perpustakaan sebagai pusat layanan informasi, pusat pembelajaran sepanjang hayat, serta sarana pengembangan literasi dan budaya baca masyarakat.

Urusan Kearsipan memiliki peran dan fungsi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang mampu menjamin ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja, memori kolektif, dan sumber informasi primer untuk pengambilan keputusan maupun alat bukti yang sah.

Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 dirancang untuk menyelesaikan target kinerja yang belum tercapai pada periode sebelumnya, sekaligus meningkatkan capaian melalui program yang sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap organisasi perangkat daerah wajib menyusun Renstra dan

Rencana Kerja (Renja) guna memastikan efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah menjadi proses krusial untuk menetapkan kebijakan masa depan melalui pendekatan kolaboratif dengan pemangku kepentingan, memanfaatkan sumber daya secara optimal dalam jangka waktu tertentu.

Di era digitalisasi yang kian masif pada saat ini, Disarpusda Kota Bekasi menghadapi tuntutan untuk bertransformasi. Masyarakat Kota Bekasi, khususnya generasi muda, semakin bergantung pada akses informasi digital, sementara kebutuhan akan pelestarian arsip fisik dan budaya literasi tetap relevan. Oleh karena itu, Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029 tidak hanya berfokus pada penyelesaian target sebelumnya, tetapi juga melakukan inovasi seperti digitalisasi arsip, pengembangan perpustakaan berbasis teknologi, dan program literasi inklusif yang menjangkau komunitas urban dan pinggiran. Program-program ini dirancang untuk mendukung visi “Kota Bekasi yang nyaman dan sejahtera”, sekaligus menjawab tantangan rendahnya minat baca dan pengelolaan arsip yang belum optimal.

Dalam konteks ini, penyusunan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025–2029 dilatarbelakangi oleh beberapa isu strategis penyelenggaraan kearsipan belum mencapai mutu tinggi serta Pembangunan literasi Masyarakat yang memerlukan perhatian dan penanganan yang terencana. Adapun yang menjadi dasar penyusunan Renstra ini antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok rentan, yang berdampak pada kualitas pendidikan dan partisipasi sosial.
2. Terbatasnya akses terhadap layanan perpustakaan yang berkualitas, baik dari segi koleksi, infrastruktur, maupun pemanfaatan teknologi informasi.
3. Pengelolaan arsip daerah belum tertib, dan penyelamatan arsip bernilai guna sekunder/kesejarahan belum baik.
4. Masih rendahnya layanan informasi kearsipan berbasis TIK agar lebih inklusif, adaptif, dan sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya di era digital dan pasca pandemi.

Renstra Perangkat Daerah didefinisikan sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub

kegiatan disertai rencana pendanaan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah tersebut. Dalam hal ini, Renstra Disarpusda menjadi pedoman utama dalam mengarahkan pelaksanaan program pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan, serta menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan (Renja) dan pengukuran kinerja perangkat daerah.

Dari sisi strategis, Renstra ini memiliki peran yang sangat penting, yaitu:

- Menjamin keterpaduan dan konsistensi perencanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029;
- Memberikan arah dan fokus kebijakan yang terukur untuk mendorong peningkatan Tingkat kegemaran membaca masyarakat dan penyelenggaraan kearsipan yang profesional;
- Menjadi dasar evaluasi kinerja perangkat daerah secara periodik melalui indikator-indikator kinerja yang disepakati;
- Mendorong inovasi dan kolaborasi dalam pengembangan layanan berbasis teknologi, termasuk transformasi digital layanan perpustakaan dan sistem informasi kearsipan daerah;
- Memastikan keberpihakan pada kelompok rentan, marginal, dan masyarakat di daerah terpencil melalui pendekatan layanan perpustakaan dan kearsipan yang inklusif.

Dengan demikian, Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029 bukan sekadar dokumen formal, melainkan pernyataan komitmen untuk meningkatkan kinerja secara terencana dan sistematis. Dokumen ini menjadi landasan strategis dalam menghadapi dinamika perkotaan terkini, mendukung pembangunan manusia yang berdaya saing, dan mewujudkan Kota Bekasi sebagai pusat informasi dan pengetahuan yang inklusif serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

I.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 – 2029 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - e. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 - g. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5987);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 - i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 - n. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi;
- t. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah;
- u. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;
- v. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- w. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- x. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kota Bekasi;
- y. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
 - z. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
 - aa. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2022 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 01);
 - bb. Peraturan Daerah Kota Bekasi 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Nomor 12)
 - cc. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2025 Nomor 10)
 - dd. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 01.A Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi;
 - ee. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

I.3 Maksud dan Tujuan

A. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029 adalah :

1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman strategis bagi Disarpusda dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan selama periode lima tahun.
2. Memastikan bahwa pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
3. Mengintegrasikan perencanaan sektoral dengan perencanaan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan, serta menjamin akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam penyediaan layanan perpustakaan dan pengelolaan kearsipan yang berkualitas dan profesional.

B. Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Disarpusda Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan arah kebijakan dan strategi operasional bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan wajib non-pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan secara sistematis dan terencana.
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsi Disarpusda.
3. Mengintegrasikan program dan kegiatan Disarpusda dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional, khususnya dalam aspek peningkatan literasi masyarakat, transformasi layanan informasi, dan penataan arsip yang akuntabel.
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen rencana kerja tahunan (Renja PD) dan penganggaran berbasis kinerja, serta sebagai dasar dalam evaluasi dan pengukuran capaian kinerja instansi.
5. Mendorong transformasi layanan perpustakaan dan kearsipan yang inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, guna menjawab tantangan zaman serta memenuhi kebutuhan informasi masyarakat secara adil dan merata.
6. Memastikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang perpustakaan dan kearsipan melalui pendekatan partisipatif, berbasis data, dan berorientasi hasil.
7. Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh jajaran Disarpusda memiliki rujukan yang jelas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun ke depan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan tata kelola informasi dan arsip yang berkualitas, serta masyarakat yang literat, berpengetahuan, dan berdaya saing.

I.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi dan nilai strategis Renstra PD, memuat dasar hukum yang relevan dan signifikan, maksud dan tujuan penyusunan Renstra serta Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat gambaran pelayanan seperti tugas, fungsi dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah dan kelompok sasaran layanan dan mitra dalam pemberian pelayanan. Permasalahan dan isu strategis perangkat daerah memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tentang tujuan, sasaran, rumusan strategi dan arah kebijakan Jangka Menengah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat penjabaran rencana program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Disarpusda Tahun 2025-2029

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1 Gambaran Pelayanan

II.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan kembali ke Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Disebutkan dalam perwal tersebut Disarpusda mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan, yang meliputi bidang kearsipan, pengembangan dan informasi kearsipan, pengembangan koelksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca.

Untuk menjalankan tugas tersebut, Disarpusda menyelenggarakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
- b. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang- Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Pembinaan administrasi perkantoran;
- e. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan Perangkat Daerah, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan

kegiatan Dinas;

- f. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
- g. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;
- h. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
- j. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

Adapun susunan organisasi Disarpusda Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Kearsipan;
- d. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan;
- e. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan;
- f. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.

Sekretariat terdiri dari :

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- B. Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas di bidang kearsipan yang meliputi pembinaan dan

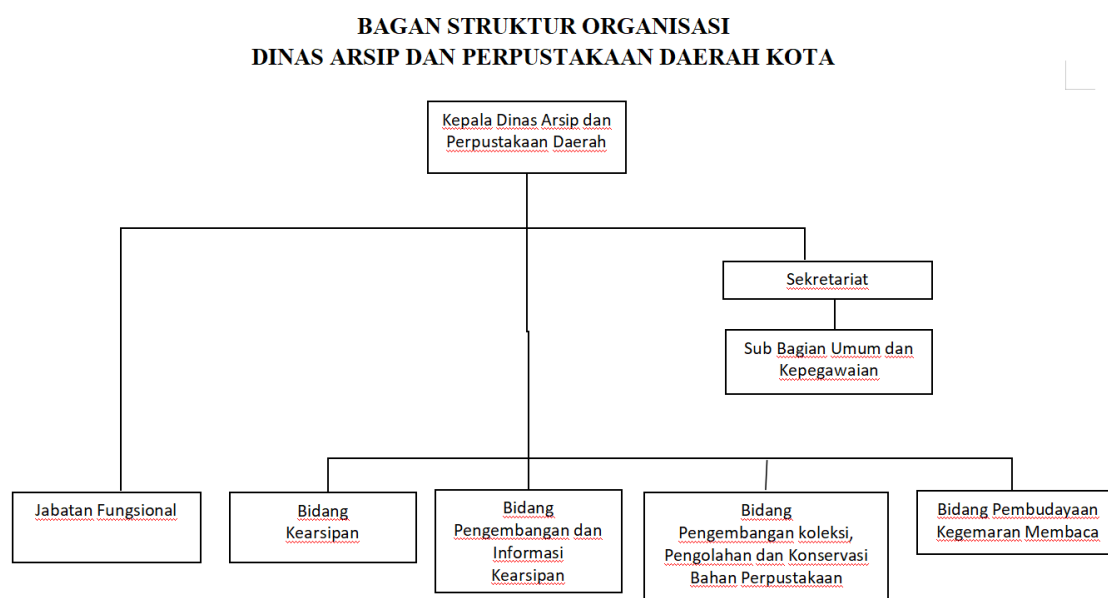
pengelolaan kearsipan dinamis, kearsipan statis dan preservasi serta pembinaan SDM kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan dibidangnya. Bidang kearsipan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan kearsipan, data dan informasi kearsipan, pengembangan pemanfaatan teknologi informasi kearsipan dan pengawasan kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan perpustakaan, otomasi dan pengolahan perpustakaan serta pengembangan dan pelestarian koleksi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pengembangan Koleksi Pengolahan dan Konservasi Bahan Perpustakaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca serta kerja sama, promosi dan jejaring perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi dan Tata Laksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi bisa dilihat dari gambar 2.1., berikut ini :



Sumber : Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

Tugas pokok dan fungsi Disarpusda merupakan penjabaran dari kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kemudian diturunkan ke Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 18 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

Amanat Perda Kota Bekasi Nomor 18 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan disebutkan Disarpusda memiliki tugas :

1. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
2. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
3. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
4. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
5. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Sedangkan amanat Perda Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan menyampaikan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) berperan aktif dalam melaksanakan :

1. Pengelolaan arsip statis yang diterima dari perangkat daerah pemerintah daerah, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan
2. Pembinaan kearsipan terhadap pencipta arsip/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
3. Manajemen arsip yang meliputi: pembinaan terhadap manajemen arsip dinamis sejak penciptaan sampai dengan penyusutan, naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip, klasifikasi akses, penataan arsip aktif, pengelolaan arsip inaktif, pemindahan arsip, penyerahan arsip statis, dan pemusnahan arsip.
4. Objek binaan yang meliputi: Perangkat Daerah, BUMD, Kelurahan, Sekolah, dan masyarakat
5. Kegiatan pembinaan yang meliputi: sosialisasi dalam memberikan pemahaman kepada objek binaan melalui media diskusi, tayang kearsipan (video, film, dll) dan media massa lainnya, Pendidikan dan pelatihan sebagai mekanisme pemberian dan peningkatan kemampuan dan pengakuan formal di bidang kearsipan serta bimbingan teknis sebagai upaya memberikan kemampuan teknis di lapangan.

II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya utama yang perlu diinformasikan dalam renstra ini antara lain sumber daya manusia yang ada pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, sarana prasarana pendukung yang dimiliki dan besarnya anggaran untuk penyelenggaraan seluruh kegiatan yang ada, uraian berikut ini memberikan gambaran secara lebih rinci terkait sumber daya organisasi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi dalam hal sumber daya manusia dan sumber daya asset/modal, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi akan diklasifikasi atas dasar jumlah personil untuk setiap kelompok fungsi yang

terdapat pada bagian Sekretariat, Bidang Kearsipan, Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan, Bidang Pengembangan Perpustakaan, dan Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca, serta kelompok jabatan fungsional, selain itu kondisi sumber daya manusia dibedakan berdasarkan status, golongan/ruang serta tingkat pendidikan SDM. Sumber daya manusia Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berjumlah 51 orang, yang terdiri dari 13 orang laki-laki dan 38 perempuan, adapun komposisi dalam struktur organisasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.1 Komposisi pegawai menurut kelompok fungsi

No.	Fungsi	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Kepala			
2	Sekretariat	7	10	17
3	Bidang Kearsipan	1	8	9
4	Bidang Pengemb. Dan Informasi Kearsipan	1	5	6
5	Bidang Pengembangan Perpustakaan	2	9	11
6	Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca	2	6	8
JUMLAH		13	38	51

Sumber : Sub Kepegawaian dan Umum Disarpusda, Juli 2025

Dalam komposisi berdasarkan latar belakang pendidikan Dinas Arsipdan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mempunyai pegawai dengan latar pendidikan S.2 sebanyak 12 orang, S1 sebanyak 23 orang, D3 5 orang, dan SMA 11 orang, yang rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2 Komposisi pegawai menurut pendidikan

No	Pendidikan	Lk	Pr	Jumlah
1	S3			0
2	S2	1	11	12
3	S1	9	14	23
4	D3		5	5
5	SMA	3	8	11
	Jumlah	13	38	51

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disarpusda, Juli 2025

Untuk komposisi berdasarkan golongan/ruang terdiri dari golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 35 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan tidak ada golongan I, yang rinciannya bisa dilihat dalam

tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Komposisi pegawai berdasarkan golongan/ruang

No	Golongan Ruang	a	b	c	d	Jumlah
1	Golongan IV	6	1	1		8
2	Golongan III	9	6	5	15	35
3	Golongan II	4		1		5
4	Golongan I					0
5	TKK					3
	Jumlah	19	7	7	15	51

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disarpusda, Juli 2025

Berdasarkan status kepegawaian Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki Aparatur Sipil Negara sejumlah 48 orang dan Pegawai TKK sejumlah 3 orang, yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Komposisi pegawai menurut status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah
		Lk	Pr	
1	Aparatur Sipil Negara			
	- Jabatan Struktutal		5	5
	- Jabatan Fungsional Tertentu	5	15	20
	- Jabatan Fungsional Umum			29
2	TKK	2	1	3
	Jumlah			51

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Disarpusda, Juli 2025

Secara kuantitas aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disarpusda. Secara kualitas pun masih kurang memadai, aparatur yang ada masih perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan agar memahami tugas dan fungsinya dalam membantu tugas dinas.

B. Sumber Daya Asset/Modal

Apabila ditinjau dari sisi prasarana, sampai dengan tahun 2022 Disarpusda Kota Bekasi memiliki Gedung Layanan Perpustakaan Daerah dan kondisi gedung tersebut kurang representatif dan tidak sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP). Selain itu Disarpusda juga memiliki Depo Arsip yang merupakan gedung ex penampungan tenaga kerja wanita, sehingga bentuknya

belum sesuai dengan standar nasional arsip. Ketersediaan kendaraan dinas berupa roda 4 dan roda 2 sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas untuk layanan perpustakaan keliling, pembinaan ke perpustakaan di wilayah, berkoordinasi ataupun mengadakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan, namun ketersediaannya kendaraan masih terbatas. Berikut rincian asset/modal yang dimiliki Disarpusda sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Disarpusda

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAI K	SEDAN G	RUSA K	JUMLA H
A	GEDUNG				
1	Pusat Arsip Pemerintah Kota Bekasi	-	1	-	1
2	Depot	-	1	-	1
3	Gedung Layanan Perpustakaan	-	1	-	1
B	KENDARAAN				
1	Sepeda Motor	9	1	-	10
2	Kendaraan Roda Empat	13	1	1	14
3	Kendaraan Mobil Keliling	2	-	-	1
4	Sepeda Motor Keliling	1	-	-	1
C	PERALATAN				
1	Filling Besi/Cabinet	48	-	-	48
2	Lemari Besi	10	-	-	10
3	Lemari Penyimpan	1	-	-	-
4	Roll O Pack Lufo	1	-	-	1
5	Rak Besi/Metal/Arsip	146	-	21	167
6	Rotary filling Roll opack ALBA	2	-	-	2
7	Lemari Kaca	10	-	-	10
8	KOLECER	4			4
9	Lemari Loker 12 Pintu	1	-	-	1
10	Lemari Sorok	4	-	-	4
11	Alat penghancur kertas	12	-	-	12
12	Lemari arsip dinamis	10	-	-	10
13	Papan visual	1	-	-	1
14	Papan Display	1	-	-	1
15	Layar Film	2	-	-	2
16	Angkutan barang trolley krisbow	2	-	-	2
17	Alat Pemadam Portable	13	-	-	13
18	Scanner	8	1	-	9
19	UPS	7	-	-	1
20	Pesawat Telephone Panasonic	1	-	-	1
21	Alat komunikasi lain-lain	1	-	-	1
22	Rak Kayu	86	-	-	86

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAI K	SEDAN G	RUSA K	JUMLAH
23	PC Unit	41	-	2	43
24	Printer	38	8	-	46
25	Personal Komputer (Lenovo C Series)	1	-	-	1
26	Peralatan Komputer Mainframe (Hardware)	1	-	-	1
27	Camera dan Attachment Canon Ixus 115	1	-	-	1
28	Camera dan Attachment sony	1	-	-	1
29	Camera dan Attachment	3	-	-	3
30	Megaphone TOA	1	-	-	1
31	Microhone Wireles Mic	1	-	-	1
32	Proyektor + Attachment	4	1	1	6
33	Soundsystem portable Xelulont	1	-	-	1
34	Loudspeaker	2	-	-	2
35	Audio Moding Portable	2	-	-	2
36	Gerobak dorong	5	-	-	5
37	Lemari Kayu	7	-	-	7
38	Lemari Kayu Penyimpanan Buku Perpustakaan	41	-	-	41
39	Kursi	47	-	-	47
40	Meja rapat	4	-	-	5
41	Meja Tambahan	1	-	-	1
42	Sofa	8	-	-	8
43	Televisi	6	-	-	6
44	Sound system polytron Home Theatre	1	-	-	1
45	Laptop/Notebok	33	-	1	34
46	Camera dan Attachment Nikon D3200	1	-	-	1
47	Kursi besi rakuda	4	-	-	4
48	Meja panjang	6	-	-	6
49	Meja komputer brilliant (Merk lain)	4	-	-	7
50	Mahframe xeon	1	-	-	1
51	Hardisk external	10	-	-	10
52	Hardisk	2	-	-	2
53	Monitor	7	-	-	7
54	Router TP-Link	1	-	-	1
55	Modem	1	-	-	1
56	Camera elektronik CCTV	2	-	-	2
57	Mesin photo copy fuji xerox DC S 2420	1	-	-	1
58	Lemari buffet kayu	1	-	-	1
59	Kursi putar	6	-	-	6
60	Kursi Tangan	4	-	-	4

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDANG	RUSAK	JUMLAH
61	Handycam Toshiba	1	-	-	1
62	Display runnting text	1	-	-	1
63	Server	1	-	-	1
64	Rak peralatan	1	-	-	1
65	Switcer Combination	2	-	-	2
66	Peralatn Studio Visual lain-lain	1	-	-	1
67	Loudspeaker	4	-	-	4
68	Microphone	2	-	-	2
69	Stabilisator	1	-	-	1
70	Camera + attachment sony Cybershoot	1	-	-	1
71	Power amplifier	1	-	-	1
72	Facsimilie	3	-	-	3
73	Papan Pengumuman	1	-	-	1
74	TV Layanan	1	-	-	1
75	Lemari Besi	1	-	-	1
76	Mesin absensi	3	-	-	3
77	Kipas Angin	2	-	-	2
78	Potable Generating Set	2	-	-	2
79	Stand Komputer	5	-	-	5

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

Berdasarkan tabel diatas, masih ada kebutuhan dalam asset/modal dalam hal ini pemeliharaan gedung pusat arsip Pemerintah Kota Bekasi, depot arsip dan gedung layanan perpustakaan yang harus segera direkondisi agar terjaganya arsip pemerintah kota Bekasi dan meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan, sedangkan kebutuhan rak arsip dan rak buku yang baru untuk menggantikan rak arsip dan buku yang rusak untuk segera dilaksanakan demi menunjang operasional tatalaksana kearsipan di LKD dan layanan perpustakaan.

Tabel 2.6 Volume arsip Urusan Kearsipan

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH	KETERANGAN
1	Arsip Dinamis In Aktif dengan masa retensi sekurang-kurangnya 10 tahun	8.062 Boks Depo A : 3.153 Boks Depo B : 2.353 Boks Depo C : 2.280 Boks	Data Tahun 2019 1.170 Boks telah selesai di kelola

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH	KETERANGAN
2	Arsip Statis pada Depo Arsip	403 Boks	
3	Arsip Elektronik (JIKN)	861 Record	

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

Tabel 2.7 Jumlah Koleksi Buku

NO	KOLEKSI	JUMLAH JUDUL	JUMLAH EXEMPLAR
1	Buku tercetak	18.620	49.472
2	Buku digital	3.896	5.208
TOTAL		22.516	54.414

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2024

C. Sistem Informasi berbasis Teknologi Informasi

Dalam menunjang pelayanan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi didukung sistem yang didasarkan atas Teknologi Informasi yang bisa dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8 Data sistem Informasi Dinas Arsip dan Perpustakaan

No.	Nama	Uraian	Keterangan
1	SRIKANDI	Pelayanan Kearsipan Dinamis	Aktif
2	SIKN/JIKN	Pelayanan Kearsipan Arsip	Aktif
3	INLISLite	Pelayanan Informasi Perpustakaan	Aktif
4	https://web-diarykotabekasi.moco.co.id/	Perpustakaan Digital	Aktif
5	Spot Baca	Akses baca buku digital tanpa menggunakan internet	Aktif

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

Aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Dalam aplikasi Srikandi, setiap informasi

berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Aplikasi Srikandi memiliki beberapa fitur utama. Pertama, fitur penciptaan arsip yang meliputi pembuatan, pengiriman, dan penerimaan naskah dinas secara elektronik antar-instansi pemerintah. Kedua, terdapat fitur pemeliharaan arsip untuk menjaganya agar tetap autentik, utuh, dan terpercaya. Di dalam aplikasi ini juga terdapat fitur penggunaan arsip oleh yang berhak, serta fitur penyusutan arsip yang meliputi pemindahan dan pemusnahan arsip. Penggunaan aplikasi Srikandi sebagai aplikasi umum instansi pemerintah dinilai sebagai bentuk peningkatan kualitas dalam bidang kearsipan. Hal ini dikarenakan setiap informasi berbasis analog dan digital akan dapat terekam dengan baik sehingga nantinya akan menjadi bukti akuntabilitas dan memori kolektif bangsa. Dengan aplikasi ini, arsip yang tercipta dan dikelola dalam SPBE akan lebih optimal dalam melindungi kepentingan hak keperdataan rakyat

JIKN yang merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip dinamis dan statis secara nasional memiliki tujuan mewujudkan layanan arsip dinamis dan statis sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah. Untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

Secara umum, arsip yang telah diproses digitalisasi dapat dimasukkan ke dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan kemudian diakses oleh publik secara online melalui website JIKN. Saat ini, sudah tersedia informasi arsip dinamis dan statis, yang dapat diakses publik, berasal dari 13 simpul jaringan.

INLISlite (Integrated Library System Lite) adalah sistem informasi perpustakaan yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas). Sistem ini bertujuan untuk memudahkan pengelolaan dan layanan perpustakaan di Indonesia, mulai dari pengelolaan koleksi buku, anggota, transaksi peminjaman, hingga laporan statistik. INLISlite hadir sebagai solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perpustakaan di seluruh Indonesia, terutama di

daerah-daerah yang belum sepenuhnya mengadopsi teknologi. INLISlite juga menyediakan fitur untuk membuat laporan-laporan yang dibutuhkan dalam pengelolaan perpustakaan. Sistem ini dapat digunakan oleh berbagai jenis perpustakaan, baik perpustakaan sekolah, perpustakaan daerah, maupun perpustakaan umum.

Versi terbaru dari INLISlite (versi 3) telah diperbarui dengan berbagai fitur baru yang bertujuan untuk mempermudah pengelolaan perpustakaan dan memfasilitasi integrasi dengan sistem lain yang digunakan oleh pemerintah dan lembaga pendidikan. INLISlite tidak hanya berfungsi sebagai perangkat lunak pengelolaan perpustakaan, tetapi juga sebagai “satu pintu” bagi para pengelola perpustakaan untuk mengelola seluruh layanan mereka secara terintegrasi.

II.1.3 Evaluasi Capaian Kinerja

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Tahun 2025–2029, diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Disarpusda selama lima tahun terakhir. Evaluasi ini mencakup capaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan bidang perpustakaan dan kearsipan selama periode tahun 2020 hingga tahun 2024, berdasarkan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Urusan perpustakaan dan kearsipan merupakan bagian dari urusan wajib non-pelayanan dasar yang memiliki kontribusi strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, terutama dalam aspek peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik, pelestarian budaya, serta penyediaan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, capaian indikator kinerja pada kedua urusan ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan program Disarpusda, tetapi juga memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi pelayanan publik di sektor informasi dan dokumentasi.

Pada urusan perpustakaan, indikator kinerja utama yang dievaluasi mencakup Nilai Tingkat Kegemaran Membaca

Masyarakat (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Kedua indikator ini menggambarkan sejauh mana masyarakat Kota Bekasi memiliki minat dan kemampuan dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi melalui sumber-sumber bacaan. Evaluasi capaian terhadap indikator ini penting untuk mengetahui efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam mendukung penguatan budaya literasi masyarakat.

Sementara itu, pada urusan kearsipan, indikator kinerja kegiatan yang dievaluasi umumnya mencakup pengawasan penyelenggaraan kearsipan. Evaluasi terhadap indikator kearsipan mencerminkan kemampuan penyelenggaraan tata kelola dokumen negara yang akuntabel, aman, dan bernilai guna tinggi, serta kesiapan Pemerintah Kota Bekasi dalam menjaga memori kolektif daerah sebagai bagian dari identitas dan pertanggungjawaban sejarah.

Evaluasi ini disajikan melalui pendekatan analisis deskriptif untuk menggambarkan perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun, dan analisis diagnostik untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi capaian tersebut, baik yang bersifat internal (seperti SDM, anggaran, kelembagaan) maupun eksternal (kebijakan nasional, dinamika sosial, perkembangan teknologi).

Berikut ini disajikan data capaian kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020–2024 sebagai dasar analisis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam periode perencanaan sebelumnya.

Tabel 2.9 Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	-	-	-	39,18	-	40,01	-	68,49	-	68,49
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	-	-	6,31	-	52,14	-	51,79	-	59,36

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, 2025

Data kinerja urusan perpustakaan di Kota Bekasi selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan capaian pada dua indikator utama yaitu Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat (TKM) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM).

Nilai TKM merepresentasikan intensitas, frekuensi, dan

kebiasaan masyarakat dalam mengakses dan membaca bahan bacaan, baik dalam bentuk tercetak maupun digital. Pada tahun 2021, nilai kegemaran membaca tercatat sebesar 39,18 dan meningkat menjadi 40,01 di tahun 2022. Tahun 2023 menunjukkan lompatan signifikan dengan capaian 68,49, dan nilai tersebut konsisten dipertahankan di tahun 2024 dengan angka yang sama 68,49. Tren peningkatan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023 mengindikasikan adanya intervensi program atau kebijakan yang berhasil.

IPLM adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Pada tahun 2021, indeks tercatat sebesar *6,31 dan melonjak drastis menjadi 52,14 pada tahun 2022. Capaian terus meningkat pada tahun 2023 51,79 dan mencapai 59,36 pada tahun 2024. tren peningkatan ini menunjukkan kemajuan positif dan konsisten.

Secara umum, kedua indikator menunjukkan peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir (2022–2024), yang menandakan efektivitas berbagai program literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan data dan tren capaian, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat yang dapat diidentifikasi:

Faktor Pendorong:

- a. Peningkatan akses layanan perpustakaan, baik secara fisik maupun digital
- b. Pelaksanaan program-program literasi yang terstruktur, seperti lomba literasi, sosialisasi gemar membaca, dan penguatan perpustakaan sekolah.
- c. Dukungan kebijakan daerah dalam bentuk sinergi antar-perangkat daerah, serta kolaborasi dengan komunitas literasi.
- d. Transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, yang meningkatkan peran perpustakaan dalam pengembangan kapasitas individu dan komunitas.

Faktor Penghambat:

- a. Belum meratanya distribusi layanan perpustakaan, terutama di wilayah padat penduduk, pinggiran, atau kawasan dengan

- keterbatasan infrastruktur.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia dan koleksi, yang berdampak pada variasi dan kualitas layanan perpustakaan.
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya kelompok usia produktif, tentang pentingnya literasi dan budaya membaca dalam kehidupan sehari-hari.
 - d. Masih terbatasnya integrasi program literasi dengan sektor pendidikan dan komunitas masyarakat secara luas.

Evaluasi kinerja lima tahun terakhir menunjukkan bahwa urusan perpustakaan di Kota Bekasi telah menunjukkan kemajuan terutama dalam tiga tahun terakhir. Hal ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan program literasi yang dilaksanakan, meskipun masih terdapat tantangan yang harus diatasi, terutama dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan.

Berikut disajikan data capaian kinerja urusan kearsipan Kota Bekasi Tahun 2020–2024 sebagai dasar analisis dan evaluasi lebih lanjut.

Tabel 2.10 Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban Nasional	Persen	-	-	-	75	-	75	-	78	-	78
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	-	-	32	-	18,66	-	50	-	50

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. 2025

Evaluasi capaian urusan kearsipan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi dilakukan melalui dua indikator Kinerja Kunci (IKK) :

1. Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah, dan Pertanggungjawaban Nasional yang menggambarkan tersedianya arsip dinamis dan arsip inaktif yang dapat diakses dan digunakan dalam rangka mendukung akuntabilitas

penyelenggaraan pemerintahan daerah. Realisasi capaian indikator ini menunjukkan tren yang **stabil dan meningkat**, yaitu: Tahun 2021: **75%**, Tahun 2022: **75%**, Tahun 2023: **78%** dan Tahun 2024: **78%**. Data menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas telah berhasil dijaga secara konsisten selama empat tahun berturut-turut.

2. Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, menggambarkan keterjagaan arsip dalam kondisi utuh, terkelola dengan baik, serta tersedia untuk kepentingan pemerintah, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Realisasi capaian mengalami fluktuasi: Tahun 2021: **32%**, Tahun 2022: **18,66%** (mengalami penurunan signifikan), Tahun 2023: **50%**, Tahun 2024: **50%** (kembali stabil). Penurunan tajam pada tahun 2022 kemungkinan besar mencerminkan adanya gangguan dalam proses pengelolaan arsip, baik karena faktor teknis, sumber daya, atau transisi sistem.

Secara umum, indikator pertama menunjukkan kinerja yang konsisten positif, sementara indikator kedua memperlihatkan adanya ketidakkonsistenan kinerja, meskipun terjadi pemulihan pada dua tahun terakhir.

Faktor Pendorong:

- Peningkatan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya pengelolaan arsip sebagai bagian dari akuntabilitas birokrasi.
- Adanya sistem pengelolaan arsip internal yang mulai diterapkan secara lebih terstruktur melalui pelatihan, monitoring, dan pendampingan.
- Komitmen kelembagaan Disarpusda dalam menyediakan layanan dan fasilitasi kearsipan, termasuk sosialisasi regulasi, audit arsip, dan dukungan penyimpanan.

Faktor Penghambat:

- Kurangnya pemahaman teknis di level perangkat daerah tentang tata kelola arsip sesuai kaidah kearsipan nasional (misalnya dalam pengelolaan arsip dinamis dan statis).
- Keterbatasan SDM arsiparis dan petugas kearsipan di banyak perangkat daerah, yang menghambat pelaksanaan tertib arsip secara menyeluruh.
- Minimnya infrastruktur dan sistem digital kearsipan, yang menyebabkan arsip-arsip penting masih dikelola secara manual dan

berpotensi rusak atau tercecer.

- Rendahnya alokasi anggaran khusus untuk kegiatan pemeliharaan dan pelestarian arsip pada beberapa tahun tertentu.

Capaian indikator kinerja urusan kearsipan Kota Bekasi selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa upaya penyediaan arsip sebagai alat akuntabilitas telah berjalan dengan baik dan stabil. Namun demikian, pada aspek keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban publik, masih ditemukan ketidakkonsistenan capaian, yang menandakan perlunya penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta integrasi sistem digital kearsipan di seluruh perangkat daerah.

Hasil analisis ini akan menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025–2029, guna mempertahankan capaian dan menjawab tantangan pembangunan literasi di masa mendatang serta lebih fokus dalam memperluas jangkauan, membangun kesadaran kolektif dan mengembangkan sistem kearsipan yang terintegrasi dan berkelanjutan

II.1.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Sementara pengukuran kinerja (performance measurement) adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Selama periode 2020–2024, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi telah menjalankan fungsi pelayanan publik di dua bidang utama, yakni perpustakaan dan kearsipan, dengan orientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses informasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis bukti.

A. Kinerja Pelayanan Bidang Perpustakaan

Kinerja pelayanan perpustakaan difokuskan pada pemenuhan hak masyarakat terhadap informasi dan pembelajaran sepanjang hayat. Disarpusda telah mengembangkan berbagai bentuk layanan, seperti:

- Penguatan layanan perpustakaan umum daerah, dengan

pengembangan koleksi, peningkatan kualitas SDM pustakawan, dan perbaikan fasilitas fisik.

- Peningkatan literasi masyarakat melalui kegiatan edukatif seperti pojok baca, lomba literasi, bedah buku, pelatihan menulis, dan pendampingan komunitas literasi.
- Transformasi layanan digital, melalui pemanfaatan aplikasi INLISLite, pengembangan perpustakaan digital, serta integrasi dengan media sosial dan platform komunikasi seperti WhatsApp.
- Ekspansi layanan luar gedung, seperti layanan mobil perpustakaan keliling, pojok baca di ruang publik, serta pembentukan perpustakaan mini di kantor RW/kelurahan.

Kinerja pelayanan ini tercermin dalam meningkatnya jumlah kunjungan, peminjaman koleksi, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi. Meskipun dihadapkan pada tantangan keterbatasan sarana dan SDM, Disarpusda mampu menjaga kontinuitas layanan dan menumbuhkan budaya baca di kalangan masyarakat.

B. Kinerja Pelayanan Bidang Kearsipan

Pelayanan di bidang kearsipan diarahkan untuk menjamin terselenggaranya tertib arsip, perlindungan dokumen penting daerah, serta ketersediaan arsip sebagai alat akuntabilitas pemerintahan. Beberapa capaian penting antara lain:

- Pembinaan dan fasilitasi kearsipan di seluruh perangkat daerah, melalui sosialisasi regulasi, pelatihan pengelolaan arsip dinamis, dan pendampingan pembentukan unit kearsipan internal.
- Penyelamatan dan pengelolaan arsip statis, termasuk penyusunan daftar arsip, restorasi fisik, dan digitalisasi arsip bernilai sejarah.
- Peningkatan pemanfaatan arsip oleh publik, baik melalui permintaan informasi arsip, pameran arsip, maupun pelayanan permohonan arsip kepegawaian.
- Penguatan sistem informasi kearsipan elektronik, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi, menjadi langkah awal modernisasi tata kelola arsip berbasis digital.

Secara umum, pelayanan di bidang kearsipan telah menunjukkan kemajuan dalam penguatan fungsi dokumentasi dan akuntabilitas pemerintahan. Namun demikian, tantangan

utama masih berkisar pada peningkatan kepatuhan perangkat daerah, penguatan SDM arsiparis, serta pengembangan sarana penyimpanan arsip permanen.

Kinerja pelayanan Disarpusda Kota Bekasi diukur berdasarkan capaian kinerja Renstra periode sebelumnya dari Disarpusda Tahun 2018-2023 melalui tingkat pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran.

Dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 terdapat 2 (dua) sasaran strategis harus dicapai oleh Disarpusda Kota Bekasi sebagaimana dalam tabel di bawah berikut.

Tabel 2.11

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2019 – 2023

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN KE-					SASARAN	INDIKATOR SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN				
			2019	2020	2021	2022	2023				TAHUN KE-				
											2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	N/A	74	75	76	77
									2	Nilai AKIP	N/A	BB 78	BB 79	A 80	A 81
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	N/A	63	65	70	75	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	3	Indeks Pengawasan Kearsipan	B 63	B 64	B 65	B 70	B 75
3	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	56	58	60	63	66	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	4	Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi	56	58	60	63	66

Gambaran capaian kinerja Disarpusda Kota Bekasi dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2018-2023 dapat dilihat

dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra PD					Realisasi Capaian Renstra PD				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP	Nilai	BB 78	BB 79	A 80	A 81	A 80	78.10	79.17	79.99	55.01	69,89
1.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	74	75	76	77	80	77.43	76.56	82.8	81.17	93,19
		Nilai AKIP	Nilai	BB 78	BB 79	A 80	A 81	A 80	78.10	79.17	79.99	55.01	69,89
2	Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	Persentase	63	65	70	75	76		75	75	78	78
2.1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Indeks	B 64	B 65	B 70	B 75	B 62	B 62.85	B 69.41	B 68.39	A 83.29	A 85.16
3	Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	41	58.19	58.84	60.54	62.59	76.92
3.1	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	N/A	N/A	N/A	N/A	53	N/A	N/A	80.88	51.79	59.36

Sumber : Data diolah Sub Bagian Perencanaan Disarpusda Kota Bekasi, 2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa Disarpusda pada tahun 2020-2021 belum berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan karena kondisi pada saat itu ada pandemi covid-19 yang mengakibatkan anggaran Disarpusda di refocusing untuk penanganan covid-19. Selain itu adanya pandemi covid-19 yang mulai masuk ke Indonesia pada pertengahan Bulan Maret 2020, semua kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak orang dalam satu tempat dibatasi, sekolah ditutup dan masyarakat dianjurkan membatasi mobilitas keluar rumah untuk mencegah penyebaran penyakit menyebabkan berkurangnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Perpustakaan Kota Bekasi belum memiliki fasilitas perpustakaan digital, masyarakat harus datang langsung untuk menikmati pelayanan perpustakaan.

Dengan keterbatasan anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah tetap berupaya untuk mencapai sasaran meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti dengan berkerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan pembinaan untuk pengelola perpustakaan dan pustakawan mendatangi langsung ke perpustakaan-perpustakaan sekolah dan masyarakat melakukan pembinaan sebagai salah satu upaya mencapai indikator program persentase perpustakaan yang aktif dan Persentase perpustakaan yang terintegrasi sistem perpustakaan. Sedangkan pencapaian untuk persentase peningkatan jumlah pengunjung sangat rendah disebabkan karena beberapa kegiatan yang semula direncanakan dilaksanakan di perpustakaan batal pelaksanaannya serta kurangnya kunjungan perpustakaan keliling karena adanya pandemic covid 19.

Dalam mencapai target sasaran tersebut, pada tahun 2019-2020 Disarpusda melaksanakan 7 (tujuh) program mengacu pada RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perpustakaan
2. Program Pembudayaan Gemar Membaca
3. Program Penyelenggaraan Kearsipan
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
7. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

Sedangkan Tahun 2021-2023 Disarpusda melaksanakan 4 (empat) Program mengacu pada RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Perpustakaan
2. Program Pengelolaan Kearsipan
3. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kinerja pelayanan Disarpusda dalam lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama dalam hal perluasan akses literasi masyarakat dan peningkatan kesadaran terhadap pengelolaan arsip yang akuntabel. Ke depan, upaya strategis perlu difokuskan pada transformasi digital layanan, penguatan kemitraan lintas sektor, serta peningkatan kualitas SDM guna menjawab tantangan pelayanan publik yang semakin dinamis dan berbasis kebutuhan masyarakat.

II.1.5 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi menyelenggarakan pelayanan publik di dua bidang utama, yaitu perpustakaan dan kearsipan, yang masing-masing memiliki karakteristik kelompok sasaran yang spesifik namun saling melengkapi. Identifikasi kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan pelayanan, program kegiatan, serta pendekatan intervensi yang inklusif dan tepat sasaran.

A. Kelompok Sasaran Layanan Perpustakaan

Layanan perpustakaan ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan penekanan pada kelompok berikut:

1. Peserta Didik dan Pelajar (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK) : Sasaran utama literasi dasar dan peningkatan minat baca.
2. Mahasiswa dan Akademisi : Pengguna layanan koleksi referensi dan repositori pengetahuan lokal.
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Pengguna layanan pengembangan kompetensi dan media belajar.
4. Masyarakat Umum : Termasuk ibu rumah tangga, pekerja, lansia, dan kelompok marjinal.
5. Komunitas Literasi, Karang Taruna, dan Organisasi Pemuda : Mitra strategis dalam penyebarluasan budaya baca dan literasi digital.
6. Penyandang Disabilitas dan Kelompok Rentan : Pengguna layanan

aksesibel berbasis inklusi sosial.

7. Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Komunitas :
Sasaran layanan pembinaan dan fasilitasi teknis pengelolaan.

B. Kelompok Sasaran Layanan Kearsipan

Layanan kearsipan menysasar entitas kelembagaan dan individu yang terlibat dalam tata kelola dokumen pemerintahan dan sejarah daerah, yaitu:

1. Seluruh Perangkat Daerah Kota Bekasi dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) : Sasaran utama pembinaan tertib arsip, pemanfaatan e-arsip, dan penyelamatan arsip vital.
2. Lembaga Pendidikan dan Organisasi Sosial : Sasaran edukasi nilai arsip sebagai memori kolektif dan sumber sejarah.
3. Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Publik : Pengguna layanan arsip kepegawaian dan pelestarian dokumen jabatan.
4. Masyarakat, Sejarawan, Peneliti, dan Akademisi : Pengguna arsip statis dan arsip terbuka untuk keperluan studi.
5. Masyarakat Umum :Pengguna layanan informasi publik berbasis arsip (hak akses terbuka).
6. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Keagamaan : Sasaran sosialisasi penyelamatan arsip keluarga dan organisasi.

II.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan jangkauan layanan di bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi menjalin kemitraan strategis dengan berbagai perangkat daerah lainnya. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan lintas sektor. Mitra perangkat daerah tersebut antara lain:

A. Bidang Perpustakaan

1. Dinas Pendidikan: Sebagai mitra utama dalam penguatan perpustakaan sekolah, literasi peserta didik, serta pelatihan pengelola perpustakaan satuan pendidikan.
2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian : Mendukung integrasi sistem informasi layanan perpustakaan (misalnya: INLISLite, website perpustakaan digital), serta publikasi literasi melalui kanal digital pemerintah.
3. Bappelitbangda : Berperan dalam perencanaan program strategis pengembangan literasi dan penganggaran pembangunan sarana perpustakaan yang merata dan inklusif.
4. Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Sebagai mitra

dalam penguatan layanan literasi bagi kelompok rentan, disabilitas, dan komunitas perempuan.

5. Kecamatan dan Kelurahan: Fasilitator lapangan untuk program literasi berbasis komunitas, pengembangan perpustakaan kelurahan, serta penjangkauan layanan mobil perpustakaan.

B. Bidang Kearsipan

1. Seluruh Perangkat Daerah (PD) : Sebagai pencipta arsip dan mitra dalam pelaksanaan tertib arsip dinamis dan penyerahan arsip statis.
2. Inspektorat Daerah : Sebagai mitra pengawasan dan penguatan akuntabilitas kearsipan dalam mendukung audit kinerja dan laporan pertanggungjawaban.
3. Bagian Organisasi dan Bagian Hukum Setda : Terlibat dalam penyusunan regulasi, kebijakan kearsipan internal, dan penguatan kelembagaan Unit Kearsipan.
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM : Mitra dalam peningkatan kompetensi SDM arsiparis, pelatihan teknis, serta pengembangan jabatan fungsional kearsipan.
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan : Berperan dalam perencanaan dan penyediaan infrastruktur depo arsip serta tata ruang untuk penyelamatan arsip fisik.

Kelompok sasaran ini menjadi acuan dalam pengembangan standar pelayanan minimal, perencanaan program literasi dan pengelolaan arsip, serta perluasan akses informasi publik yang transparan dan inklusif. Dengan mengenali karakteristik sasaran layanan, Disarpusda dapat merancang pendekatan yang lebih tepat, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan kelembagaan. Kemitraan antar perangkat daerah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola informasi dan arsip yang modern, serta penguatan budaya literasi masyarakat. Kolaborasi ini akan terus diperluas dan diperkuat selama periode Renstra 2025–2029, seiring dengan tuntutan transformasi digital dan pelayanan publik yang adaptif.

II.1.7 Kerjasama Daerah Dalam Mendukung Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi memandang bahwa kerja sama daerah merupakan salah satu strategi penting yang mendukung tercapainya efisiensi, efektivitas, serta perluasan jangkauan layanan kepada masyarakat.

Kerja sama daerah yang dilakukan oleh Disarpusda mencakup kerja sama antardaerah, kerja sama dengan pihak ketiga, serta kolaborasi dengan

lembaga pemerintah di tingkat nasional, yang bertujuan untuk mempercepat transformasi layanan perpustakaan dan tata kelola kearsipan berbasis digital serta inklusi sosial.

Beberapa bentuk kerja sama yang telah dan akan dikembangkan antara lain:

1. Kerja Sama Antar Daerah

Disarpusda membangun kemitraan dengan dinas sejenis di kabupaten/kota sekitar, terutama dalam bentuk pelatihan bersama pustakawan dan arsiparis, pertukaran koleksi pustaka, serta penguatan literasi komunitas lintas wilayah. Kerja sama ini ditujukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memperluas jangkauan layanan literasi.

2. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Non-Pemerintah)

Kolaborasi dilakukan dengan perguruan tinggi, komunitas literasi, dan sektor swasta (melalui program CSR) untuk mendukung peningkatan minat baca, penyediaan sarana baca, pelatihan digitalisasi arsip, serta promosi literasi di tingkat keluarga dan sekolah. Disarpusda juga membuka ruang kolaboratif dengan organisasi profesi seperti IPI dan AAIPI dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

3. Kerja Sama dengan Lembaga Nasional

Dalam pelaksanaan fungsi teknis, Disarpusda menjalin kerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Bentuk kerja sama ini mencakup penggunaan sistem informasi (seperti INLISLite dan SIKD), pelatihan teknis, pendampingan audit kearsipan, serta digitalisasi arsip statis dan pustaka daerah.

Melalui pendekatan kerja sama yang terstruktur dan berkelanjutan, Disarpusda berkomitmen memperkuat ekosistem literasi dan pengelolaan arsip yang inklusif, partisipatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Hal ini juga sejalan dengan prinsip sinergi antar sektor yang diamanatkan dalam kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

II.2 Permasalahan Dan Isu Strategis

II.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Disarpusda

Sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan, Disarpusda Kota Bekasi memiliki tanggung jawab strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan layanan informasi, serta penguatan tata Kelola pemerintahan berbasis data dan Dokumen.

Identifikasi permasalahan dilakukan sebagai bagian dari proses penyusunan Rencana Strategis Dinas, untuk memastikan bahwa strategi dan program yang dirumuskan benar-benar menjawab persoalan riil yang dihadapi di lapangan. Proses identifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi capaian kinerja lima tahun terakhir, masukan dari pemangku kepentingan, serta analisis terhadap factor internal dan eskternal.

Kompleksitas penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan pada era otonomi daerah sampai saat ini secara fundamental semakin meningkat, karena peran pemerintahan daerah dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, maka semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah akselerasinya harus dipercepat termasuk urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

Dalam rangka mempercepat akselerasi pelaksanaan kinerja urusan perpustakaan dan urusan kearsipan di daerah, sesuai dengan kondisi perkembangan kondisi kompleksitas penyelenggaraan urusan perpustakaan dan urusan kearsipan, terdapat identifikasi permasalahan untuk melakukan pemetaan masalah.

Tabel 2.13
Identifikasi Permasalahan Disarpusda

No .	Urusan / Fungsi	Tugas dan Fungsi Utama	Permasalahan yang Dihadapi	Akar Masalah	Dampak
1	Perpustakaan	Menyelenggara kan layanan perpustakaan daerah sebagai pusat informasi, pembelajaran, dan literasi masyarakat	Akses layanan belum merata, terutama di wilayah pinggiran dan kelompok rentan	Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana dan distribusi layanan	Ketimpangan akses informasi dan literasi
			Tingkat literasi masyarakat masih belum merata antar wilayah dan kelompok umur	Minimnya intervensi program literasi berbasis komunitas dan keluarga	Rendahnya budaya baca dan partisipasi masyarakat

No .	Urusan / Fungsi	Tugas dan Fungsi Utama	Permasalahan yang Dihadapi	Akar Masalah	Dampak
			Koleksi bahan pustaka kurang sesuai dengan kebutuhan pengguna	Kurangnya pemutakhiran koleksi berbasis minat dan kebutuhan pengguna	Layanan perpustakaan kurang relevan dan kurang dimanfaatkan
			Terbatasnya jumlah pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan	Keterbatasan rekrutmen, pelatihan, dan formasi fungsional	Penurunan kualitas layanan dan pendampingan literasi
			Pemanfaatan TIK dalam layanan digital masih terbatas	Keterbatasan infrastruktur dan kompetensi digital	Tidak tercapainya transformasi layanan perpustakaan modern
			Kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan literasi masih lemah	Belum adanya regulasi teknis yang memperkuat jejaring dan kemitraan	Program literasi berjalan parsial dan tidak berkelanjutan
2	Kearsipan	Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Rendahnya pembinaan kearsipan untuk Unit Kearsipan II	Kondisi Unit II Kearsipan dan <i>Record Center</i> belum memadai/layak	Arsip dinamis yang terdiri dari arsip vital, arsip aktif, arsip inaktif sangat sulit untuk diselamatkan dan diamankan
		Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, BUMD kabupaten/kota, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah	Arsip statis yang dihasilkan oleh pencipta arsip belum berkualitas sesuai standar kearsipan	Pemahaman pengelolaan arsip statis belum baik	Penyelamatan arsip bernilai guna kesejarahan belum baik

No .	Urusan / Fungsi	Tugas dan Fungsi Utama	Permasalahan yang Dihadapi	Akar Masalah	Dampak
		kabupaten/kot a, organisasi politik tingkat Daerah kabupaten/kot a, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat Daerah kabupaten/kot a			
		Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten/kot a.	Simpul jaringan JIKN belum tertata dengan baik	Pemahaman pengelolaan simpul jaringan JIKN belum baik	JIKN belum dapat terintegrasi dengan baik

Berdasarkan tabel 2.13 Identifikasi permasalahan layanan perangkat daerah diatas, terdapat berberapa permasalahan yaitu :

A. Urusan Perpustakaan

Tugas dan Fungsi:

Menyelenggarakan layanan perpustakaan umum daerah yang bertujuan menyediakan akses informasi, bahan bacaan, dan pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan yang Diidentifikasi:

1. Belum meratanya akses layanan perpustakaan, khususnya di wilayah padat penduduk, kawasan pinggiran, dan komunitas marjinal.
2. Rendahnya tingkat literasi masyarakat, meskipun capaian indikator meningkat, namun masih terdapat kesenjangan literasi antar wilayah dan kelompok usia.
3. Keterbatasan jumlah dan kualitas koleksi bahan pustaka yang sesuai dengan kebutuhan dan minat baca masyarakat.
4. Kurangnya tenaga perpustakaan profesional (pustakawan) di unit-unit layanan, terutama pada perpustakaan kelurahan, sekolah, dan komunitas.
5. Minimnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mengembangkan layanan digital perpustakaan yang lebih inklusif dan adaptif.

6. Masih lemahnya kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan budaya literasi, baik dengan dunia pendidikan, komunitas, maupun sektor swasta.

B. Urusan Kearsipan

Tugas dan Fungsi:

Menyelenggarakan pengelolaan arsip daerah yang meliputi arsip dinamis, arsip statis, dan penyelenggaraan sistem kearsipan secara terintegrasi di seluruh perangkat daerah.

Identifikasi masalahnya pengelolaan arsip pada Unit Kearsipan II belum memadai, pemahaman pengelolaan arsip statis belum baik, dan penataan simpul jaringan JIKN belum terintegrasi

Berdasarkan identifikasi masalah urusan kearsipan diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Unit Kearsipan II dengan Unit Kearsipan belum sinkron dan sinergis dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan arsip dinamis;
2. kebijakan pengelolaan arsip statis belum memadai;
3. ketersediaan data arsip sebagai informasi publik masih kurang

Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam aspek pelayanan, namun masih dibutuhkan upaya strategis yang lebih kuat dan kolaboratif guna memastikan bahwa fungsi dan peran Disarpusda dapat dilaksanakan secara optimal, adaptif, dan berkelanjutan. Permasalahan ini selanjutnya akan menjadi dasar dalam perumusan isu strategis, tujuan, sasaran, dan strategi dalam Renstra 2025–2029.

II.2.2 Identifikasi Isu Strategis Sesuai Lingkungan Dinamis

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029, penting untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi capaian kinerja perangkat daerah di tengah dinamika lingkungan global, nasional, maupun regional. Isu strategis tersebut baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Isu strategis dirumuskan berdasarkan berbagai dokumen perencanaan dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:

- RPJMN 2025–2029, yang menetapkan agenda pembangunan sumber daya manusia, transformasi digital, dan reformasi birokrasi, termasuk penguatan literasi masyarakat dan pengelolaan pengetahuan melalui perpustakaan.
- Renstra Kementerian/Lembaga terkait, seperti Renstra Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI, yang mendorong percepatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta penguatan pengelolaan arsip digital dan penyelamatan arsip statis.
- Laporan resmi lembaga nasional dan internasional, seperti UNESCO, BPS, dan Kominfo, yang menunjukkan tren menurunnya minat baca di masyarakat, ketimpangan akses literasi, serta kerentanan pengelolaan arsip di era disrupsi digital.
- KLHS RPJMD Kota Bekasi 2025–2029, yang mencerminkan pentingnya pengelolaan informasi dan dokumen sebagai instrumen keberlanjutan pembangunan yang inklusif, akuntabel, dan ramah lingkungan.
- Penjaringan aspirasi masyarakat, hasil forum konsultasi publik dan forum perangkat daerah menunjukkan perlunya optimalisasi layanan perpustakaan di tingkat kelurahan dan pembinaan tertib arsip di seluruh perangkat daerah.

Dari berbagai sumber tersebut, isu-isu strategis yang dapat memengaruhi keberhasilan pelayanan Disarpusda antara lain:

1. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat dan budaya baca yang belum merata, terutama di wilayah pinggiran, kelompok usia produktif, dan rumah tangga miskin informasi.
2. Transformasi digital layanan publik belum sepenuhnya menyentuh sektor perpustakaan dan kearsipan, akibat keterbatasan infrastruktur dan kapasitas SDM.
3. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis dan statis sebagai alat bukti dan akuntabilitas pemerintah daerah, yang berisiko pada hilangnya memori institusional dan rendahnya nilai kepatuhan kearsipan.
4. Tantangan penyelamatan arsip sejarah dan dokumentasi pemerintahan di era disrupsi informasi, termasuk perlunya digitalisasi dan restorasi arsip bernilai guna tinggi.
5. Rendahnya integrasi dan sinergi antar OPD serta komunitas dalam pembangunan budaya literasi dan tertib arsip, akibat lemahnya regulasi teknis dan koordinasi lintas sektor.

Isu-isu strategis tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, dan program prioritas Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota

Bekasi dalam lima tahun ke depan, dengan harapan dapat menciptakan layanan yang adaptif, inklusif, serta berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi.

Isu Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi disusun berdasarkan teknik identifikasi yang mengacu pada arahan Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, dengan mempertimbangkan tiga sumber utama yaitu: permasalahan aktual, isu strategis dari lingkungan dinamis (global, nasional, regional), serta potensi kewenangan daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini table 2.14 Teknik menyimpulkan isu strategis PD sesuai dengan Inmendagri nomor 2 Tahun 2025 :

Tabel 2.14 Teknik menyimpulkan isu strategis PD

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Global	Isu Nasional	Isu Regional	Isu Strategis PD
Tingginya potensi budaya literasi masyarakat Kota Bekasi	Minat baca masyarakat belum merata, khususnya di wilayah padat dan pinggiran	Rendahnya akses informasi berkelanjutan	Masifnya konten digital global tidak selalu relevan dan berkualitas	Arah RPJMN 2025–2029: Penguatan SDM & literasi digital	Kesenjangan literasi antar wilayah dalam kota	Perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan
Ketersediaan arsip dinamis perangkat daerah sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah belum maksimal	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib	Risiko kehilangan arsip sebagai alat bukti dan sumber informasi primer organisasi tinggi	Ketersediaan arsip yang terintegrasi sebagai sumber informasi primer suatu bangsa belum maksimal	Pengintegrasian Sistem Informasi Kearsipan Nasional untuk mencapai pemerintahan yang terbuka, transparan, terpercaya belum baik	Ketersediaan arsip dinamis perangkat daerah sebagai bukti akuntabilitas dan alat bukti yang sah belum maksimal	Pengelolaan arsip dinamis belum tertib
Keutuhan dan keselamatan arsip bernilai guna sekunder belum maksimal	Penyelamatan arsip belum optimal	Risiko kehilangan arsip yang memiliki nilai guna sekunder/kesejarahan tinggi	Menguatnya keutuhan memori kolektif bangsa secara digital belum tinggi	Transformasi Lembaga Kearsipan Daerah sebagai pusat pengetahuan dan memori kolektif bangsa belum optimal	Peran dan fungsi pencipta arsip terhadap penyelamatan arsip belum baik	Arsip yang dihasil oleh pencipta arsip yang bernilai guna sekunder/kesejarahan masih minim

Melalui teknik tersebut, dirumuskan tiga isu strategis utama yang berakar dari dua urusan pelayanan publik yang menjadi domain Disarpusda, yakni urusan perpustakaan dan urusan kearsipan.

1. Isu Strategis Literasi Masyarakat

Kota Bekasi memiliki potensi sosial-budaya dalam mengembangkan budaya literasi masyarakat. Namun, permasalahan yang muncul adalah belum meratanya minat baca, terutama di wilayah padat penduduk dan pinggiran. Dari perspektif lingkungan dinamis, arus informasi digital global belum sepenuhnya mendukung peningkatan literasi, bahkan memunculkan risiko disinformasi. Secara nasional, RPJMN 2025–2029 menekankan pentingnya peningkatan SDM dan transformasi literasi digital. Di tingkat regional, terlihat adanya ketimpangan akses informasi antar wilayah dalam kota. Maka isu strategis yang dirumuskan adalah perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah untuk mendorong pemerataan literasi.

2. Isu Strategis Tata Kelola Kearsipan

Dari sisi kearsipan, meskipun SDM arsiparis tersedia, masih ditemukan rendahnya kepatuhan perangkat daerah dalam tertib arsip dinamis. Isu KLHS mengidentifikasi bahwa keterbatasan dokumentasi berdampak pada lemahnya pemantauan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, secara global dan nasional, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas publik terus meningkat. Di tingkat regional, kolaborasi lintas OPD dalam kearsipan belum optimal. Oleh karena itu, dirumuskan isu strategis berupa penguatan sistem kearsipan daerah untuk mendukung akuntabilitas pemerintahan.

3. Isu Strategis Pelestarian Arsip Sejarah

Kota Bekasi memiliki arsip sejarah dan dokumen penting yang bernilai tinggi, namun upaya penyelamatan dan digitalisasi masih terbatas. Dari aspek lingkungan dinamis, terdapat kesadaran global tentang pentingnya perlindungan warisan dokumenter, yang juga tercermin dalam agenda nasional pelestarian budaya takbenda. Isu regional mencerminkan lemahnya infrastruktur depo arsip dan fasilitas pelestarian. Oleh karena itu, isu strategis yang ditetapkan adalah penguatan pelestarian arsip sejarah untuk identitas dan pendidikan publik.

Tiga isu strategis tersebut menjadi dasar bagi penyusunan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan dalam Renstra Disarpusda 2025–2029, agar pelayanan publik di bidang perpustakaan dan kearsipan semakin adaptif terhadap

tantangan zaman, inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, dan relevan dengan pembangunan berkelanjutan di Kota Bekasi.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi merupakan arah dan pandangan ke depan dalam membantu menyelesaikan isu strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam menghadapi tantangan masa depan, yang memuat cita-cita yang ingin diwujudkan sehingga dapat berkarya secara kreatif, inovatif, produktif dan konsisten pada pertumbuhan (*suistanable growth*).

Penentuan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Disarpusda didasarkan atas Visi dan Misi Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Dalam mewujudkan “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera” sesuai visi Kota Bekasi, Disarpusda membantu dalam mewujudkan Misi 2 Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun Rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan dengan Tujuan yaitu “Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis” dengan sasaran “Meningkatnya Pendidikan Masyarakat yang berkualitas dan merata” dan Misi ke 5 “Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren dengan Tujuan Kota Bekasi “Terwujudnya Kota Bekasi cerdas disertai tata Kelola pemerintahan modern dan inovatif” dengan sasaran “Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota”.

Berdasarkan rekomendasi strategis yang merupakan hasil analisis isu- isu strategis dan permasalahan yang ada, maka Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada lima tahun mendatang.

III.1 Tujuan Renstra

Dalam kerangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan tujuan strategis lima tahunan yang merupakan turunan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029 yaitu “Meningkatkan Budaya Membaca Masyarakat dan Mutu Kearsipan”. Tujuan ini juga disusun dengan mempertimbangkan permasalahan aktual, potensi daerah, serta isu strategis global, nasional, dan lokal yang relevan. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan budaya membaca masyarakat

Tujuan ini ditetapkan untuk merespons masih rendahnya tingkat kegemaran membaca di masyarakat, ketimpangan akses layanan informasi, serta tantangan literasi di era digital. Budaya literasi yang kuat menjadi dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan merata.

- Keterkaitan dengan RPJMD:
 - Tujuan RPJMD: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis, dan harmonis
 - Sasaran RPJMD: Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata
- Indikator tujuan:
 - Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM)

Budaya baca merupakan pilar utama dalam pembangunan manusia, terutama dalam mendukung terwujudnya masyarakat Kota Bekasi yang cerdas, inklusif, dan berdaya saing. Dalam konteks transformasi digital dan perubahan gaya hidup yang semakin cepat, penguatan budaya baca menjadi sangat penting untuk membentuk warga yang literat, kritis, dan adaptif terhadap informasi. Oleh karena itu, pengukuran Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) menjadi strategi kunci dalam menilai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas membaca, baik secara mandiri maupun kolektif. TKM tidak hanya mengukur aspek layanan perpustakaan, tetapi lebih menekankan pada perilaku, motivasi, dan dampak membaca terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui pendekatan ini, Kota Bekasi dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pola dan kualitas budaya baca yang berkembang di tengah masyarakat.

Pengukuran TKM memiliki dasar filosofi yang kuat, yaitu nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kedua dan kelima yang menempatkan membaca sebagai hak dasar manusia dan bagian dari keadilan sosial. TKM juga memiliki legitimasi yuridis melalui Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta kebijakan nasional lain seperti RPJMN 2020–2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025–2045, dan Permendikbudristek No. 23 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Literasi. Dari sisi sosiologis, TKM mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat terhadap akses informasi dan literasi yang inklusif. Budaya baca tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui interaksi antara individu dengan keluarga, sekolah,

komunitas, dan institusi publik. Dengan memahami konteks sosiologis ini, Pemerintah Kota Bekasi dapat merancang kebijakan yang lebih akurat, tepat sasaran, dan berkeadilan.

TKM dirancang secara nasional dengan ruang lingkup yang mencakup berbagai kelompok usia, jenis kelamin, pendidikan, dan pekerjaan. Di Kota Bekasi, hasil pengukuran ini menjadi landasan dalam merumuskan program-program literasi yang adaptif terhadap kondisi lokal. Instrumen TKM digunakan untuk mengidentifikasi minat dan motivasi baca, menilai keterlibatan masyarakat dalam aktivitas membaca, serta menganalisis dampak membaca terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial. Struktur pengukuran TKM terdiri dari tiga fase utama: pra membaca, saat membaca, dan pasca membaca. Fase pra membaca mencakup kesiapan, akses terhadap bacaan, serta dukungan dari keluarga atau guru. Fase saat membaca mengukur intensitas, strategi memahami bacaan, dan keterlibatan emosional. Sementara fase pasca membaca menilai sejauh mana hasil bacaan memberikan dampak terhadap sikap, perilaku, dan penerapan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Setiap fase memiliki indikator yang telah divalidasi secara ilmiah dan diberi bobot penilaian yang setara. Sebagai pelengkap, terdapat juga variabel interaksi dengan layanan perpustakaan sebagai elemen penting dalam pembentukan ekosistem literasi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi memanfaatkan hasil TKM sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan literasi ke depan. Upaya ini mencakup peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh fase membaca melalui program pembinaan yang menjangkau keluarga, sekolah, dan komunitas. Pustakawan dan relawan literasi akan dilibatkan secara aktif dengan pendekatan berbasis teknologi dan komunitas. Hasil TKM juga akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan evaluasi program tahunan, serta dijadikan indikator capaian kinerja budaya baca di tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan pendekatan ini, strategi pengembangan budaya baca Kota Bekasi akan lebih terukur, inklusif, dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Penerapan sistem pelaporan TKM secara digital juga akan mendukung transparansi, efisiensi, dan sinergi antar perangkat daerah. Dengan demikian, Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk menjadi kota yang literat, cerdas, dan berdaya tahan dalam menghadapi tantangan era informasi.

2. Meningkatkan mutu pengelolaan kearsipan daerah

Tujuan ini berkaitan dengan upaya memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan terdigitalisasi. Arsip yang dikelola secara baik tidak hanya mendukung efisiensi kerja organisasi pemerintah, tetapi juga menjamin ketersediaan informasi untuk kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan.

- Keterkaitan dengan RPJMD:
 - Tujuan RPJMD: Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan yang modern dan inovatif
- Indikator tujuan:
 - Indeks Pengawasan Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan salah satu tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional serta menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bekasi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kearsipan lingkup Pemerintah Kota Bekasi sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Penyelenggaraan kearsipan harus sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan pengawasan kearsipan. Pengawasan kearsipan terhadap penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten/kota merupakan tanggung jawab Lembaga Kearsipan Daerah (LKD).

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan kearsipan dilakukan melalui kegiatan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan penegakan

peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilakukan dengan audit kearsipan dan monitoring melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

III.2 Sasaran Renstra

Sasaran perangkat daerah merupakan penjabaran lebih operasional dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode lima tahun, dan menjadi dasar bagi penetapan strategi, arah kebijakan, program, serta indikator kinerja utama perangkat daerah.

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan RPJMD Kota Bekasi serta menjawab isu-isu strategis yang telah diidentifikasi, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah menetapkan dua sasaran utama berikut:

1. Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat dengan indicator sasaran yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk memperkuat fondasi masyarakat Kota Bekasi yang cakap informasi, berpikir kritis, dan memiliki keterampilan membaca yang tinggi. Hal ini diperlukan sebagai respons atas tantangan literasi digital, pesatnya arus informasi global, serta kebutuhan akan masyarakat pembelajar sepanjang hayat (*lifelong learner*).

Sasaran ini mendukung tujuan peningkatan budaya baca masyarakat dan peningkatan akses terhadap sumber informasi yang inklusif dan berkelanjutan. Indikator sasaran ini adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang mencerminkan capaian dalam aspek akses, keterlibatan, dan hasil pembelajaran berbasis literasi di tingkat Kota Bekasi.

Upaya membangun kualitas manusia budaya literasi perlu dijadikan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat berkualitas dan sejahtera. Literasi adalah bentuk *cognitive skill* memungkinkan manusia untuk mengidentifikasi, mengerti, memahami, dan mencipta yang diperoleh dari kegiatan membaca yang kemudian ditransformasikan dalam kegiatan-kegiatan yang produktif yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi berkontribusi dalam pengembangan kebudayaan untuk mewujudkan masyarakat

berpengetahuan dan berkarakter. Berbagai data hasil penelitian umumnya masih menunjukkan bahwa minat dan kebiasaan masyarakat Indonesia masih cukup rendah. Rendahnya minat dan kebiasaan membaca tersebut dapat dipengaruhi pada beberapa faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana membaca, rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya dukungan dari berbagai pihak, terutama dari pemerintah dan wakil rakyat, serta berbagai faktor lainnya.

IPLM merupakan pengukuran nilai indeks yang digunakan untuk memformulasikan kebijakan pembangunan bidang perpustakaan, serta digunakan sebagai acuan dalam pengembangan dan pembinaan semua jenis perpustakaan di Indonesia. Sehingga diperlukan adanya ketersediaan data yang akurat dan holistik tentang semua jenis perpustakaan baik pada aspek koleksi, tenaga pengelola, sarana dan prasarana, hingga pelayanan pada pemustaka dan pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan literasi di perpustakaan. Ketersediaan dan penyelenggaraan perpustakaan diyakini mampu berkontribusi pada upaya pembangunan literasi masyarakatnya.

Salah satu tujuan pengukuran IPLM adalah diperolehnya dukungan pemerataan dan pengembangan sarana/prasarana infrastruktur serta peningkatan strategi layanan perpustakaan, karena itu tinggi rendahnya kategori IPLM yang dicapai oleh setiap daerah dapat menjadi dasar/acuan dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan mutu layanan perpustakaan di daerah masing-masing. Strategi pengembangan perpustakaan dapat disesuaikan dengan jenisnya yang mengacu pada standar nasional perpustakaan.

Dengan terbangunnya infrastruktur perpustakaan serta unsur-unsur pembangun literasi di perpustakaan seperti pustakawan dan tenaga perpustakaan, koleksi, kunjungan pemustaka, serta pelibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan sosialisasi maupun kegiatan literasi masyarakat. Pembangunan pada setiap unsur tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan literasi masyarakat di seluruh Indonesia, melalui pemerataan pembangunan dan pengembangan perpustakaan.

2. Meningkatnya Mutu Kearsipan dengan indikator sasaran Tingkat digitalisasi arsip

Sasaran ini diarahkan untuk memperbaiki tata kelola arsip secara

menyeluruh, baik arsip dinamis maupun statis, serta mempercepat proses digitalisasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan transformasi pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Kearsipan yang bermutu tinggi akan mendukung efektivitas pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, serta menjamin keberlanjutan memori kelembagaan dan pembangunan daerah. Indikator sasaran ini adalah Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip, yang mengukur sejauh mana arsip dikelola secara elektronik, terintegrasi, dan mudah diakses untuk mendukung efisiensi dan transparansi pelayanan publik.

Tingkat digitalisasi arsip merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan tata kelola kearsipan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Digitalisasi arsip tidak hanya berfungsi sebagai bentuk alih media dari arsip fisik ke dalam bentuk digital, namun juga mencerminkan transformasi sistem pengelolaan arsip menuju sistem informasi kearsipan elektronik yang terintegrasi.

Secara regulatif, pengelolaan arsip secara elektronik telah diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, serta Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Elektronik (PADE). Dalam regulasi tersebut, digitalisasi arsip dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.

Tingkat digitalisasi arsip diukur melalui beberapa aspek, antara lain:

- Persentase arsip yang telah dialihmediakan ke bentuk digital dibandingkan dengan total arsip fisik yang dikuasai oleh Perangkat Daerah;
- Ketersediaan dan penggunaan sistem informasi kearsipan elektronik (SIKD/e-Arsip) yang memungkinkan pengelolaan arsip secara sistematis dan terdokumentasi;
- Kepatuhan terhadap standar metadata dan format digital yang ditetapkan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), seperti penggunaan format PDF/A, TIFF, dan XML;
- Tingkat keamanan dan keberlanjutan data digital, termasuk sistem backup, enkripsi, dan kemampuan pemulihan data bila terjadi gangguan (disaster recovery plan);
- Kemudahan akses dan temu kembali arsip elektronik, baik untuk internal instansi maupun bagi masyarakat melalui layanan informasi publik.

Penerapan digitalisasi arsip juga sejalan dengan prinsip reformasi

birokrasi, di mana tata kelola informasi yang baik mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, digitalisasi arsip turut mendukung agenda pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan transformasi menuju Kota Bekasi Cerdas (Smart City).

Dengan demikian, pencapaian tingkat digitalisasi arsip yang tinggi menjadi salah satu ukuran keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang modern dan andal, serta menjadi elemen kunci dalam pencapaian tujuan strategis Disarpusda, yaitu meningkatnya mutu pengelolaan arsip daerah.

Selain melalui penerapan digitalisasi arsip, peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan juga dapat dilakukan melalui peningkatan keselamatan arsip kesejarahan Kota Bekasi, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 3 bahwa tujuan penyelenggaraan kearsipan adalah menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jatidiri bangsa.

Penyelamatan arsip kesejarahan Kota Bekasi memiliki nilai strategis yaitu keberadaannya memiliki mutu/nilai dan dampak/pengaruh jangka menengah dan jangka panjang meliputi sejak berdirinya Kota Bekasi sampai dengan saat ini, serta diwariskan untuk generasi yang akan datang.

Sasaran Disarpusda tersebut dirancang untuk memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kota Bekasi sebagai Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera, sesuai dengan visi pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Selanjutnya, sasaran ini akan dijabarkan ke dalam program prioritas, indikator kinerja program, serta target tahunan yang terukur dan realistis.

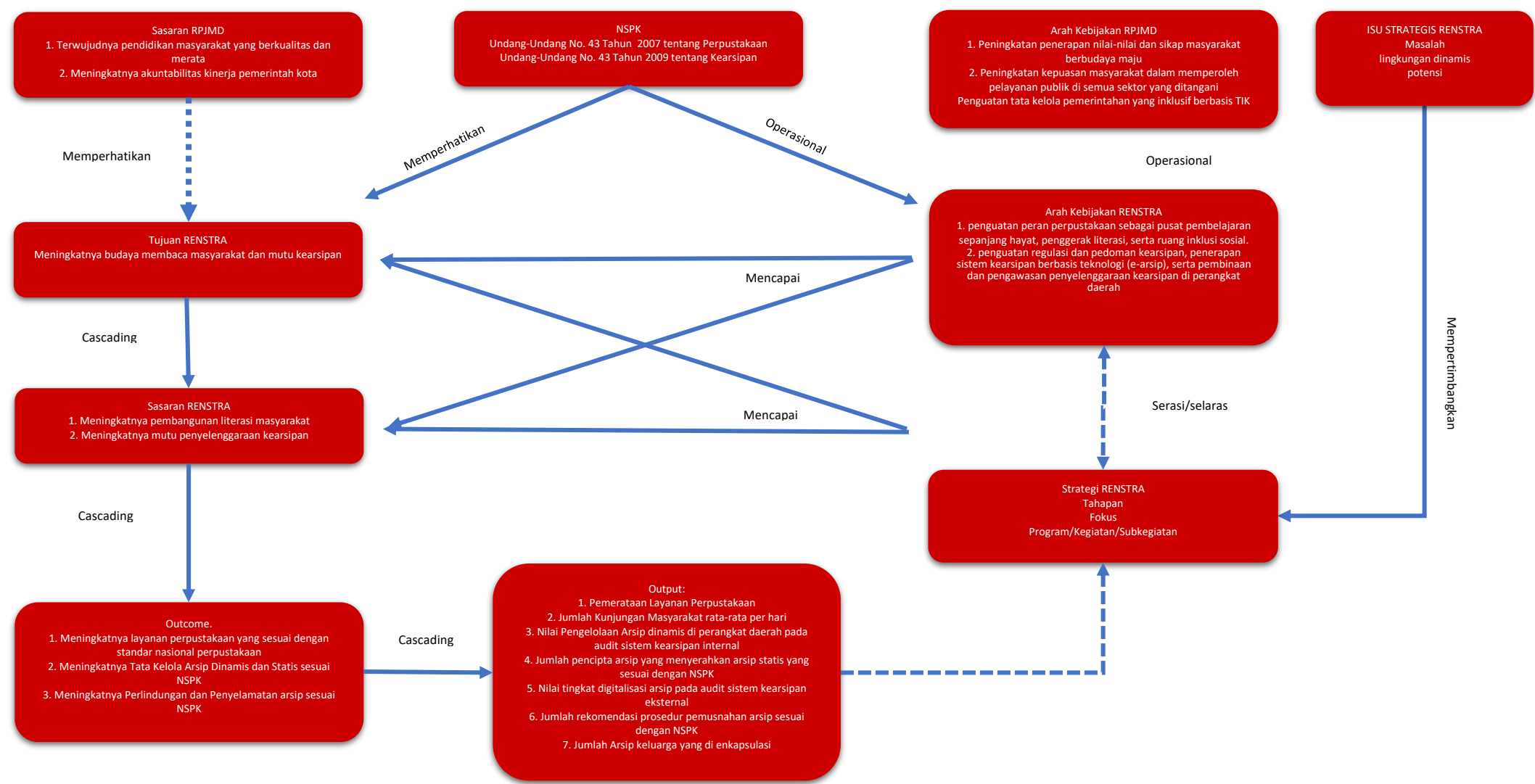
Terkait dengan perumusan tujuan dan sasaran diatas diindikasikan dandiintreprestasikan dalam tabel 3.1, berikut ini:

Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Disarpusda Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	INDIKATOR	REALISASI 2024	TARGET TAHUN						KET
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Tujuan RPJMD: Terwujudnya daya saing SDM Kota Bekasi yang berbudaya, humanis dan harmonis	Tujuan Renstra: Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan	Indikator Tujuan I: Nilai TGM			76,92	77.02	77.12	77.22	77.32	77.42	77.52	
Sasaran RPJMD : Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata			Sasaran Renstra I: Meningkatnya pembangunan literasi Masyarakat	Indikator Sasaran I: Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59,36	59.46	59.56	59.66	59.76	59.86	59.96	
Tujuan RPJMD : Terwujudnya Kota Bekasi Cerdas disertai tata kelola pemerintahan modern dan inovatif		Indikator Tujuan II: Indeks pengawasan kearsipan			85,16	85.26	85.36	85.46	85.56	85.66	85.76	
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota			Sasaran Renstra II: Meningkatnya mutu penyelenggaraan kearsipan	Indikator Sasaran II: Indeks tingkat digitalisasi arsip	93	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	

Berikut digambarkan alur kinerja mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan daerah Kota Bekasi sampai dengan tujuan, sasaran sampai *outcome* (sasaran program) yang terkait Disarpusda Kota Bekasi.

Gambar 3.1
Konsep Renstra Disarpusda



III.3 Strategi Disarpusda

Dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tahun 2025-2029, diperlukan strategi yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program prioritas untuk mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah.

Strategi dalam RENSTRA Disarpusda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Disarpusda diselaraskan dengan strategi daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 dan selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Disarpusda selama lima tahun kedepan.

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Disarpusda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran pemerintah Kota Bekasi 2025-2029, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi telah menyusun strategi sebagai berikut :

Urusan kearsipan

Pengelolaan kearsipan merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks pemerintahan daerah, arsip tidak hanya menjadi sumber informasi administrasi, tetapi juga memegang peran penting sebagai alat bukti hukum, memori organisasi, dan

warisan dokumenter pembangunan. Oleh karena itu, pengelolaan arsip yang tertib, sistematis, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi merupakan kebutuhan strategis yang tidak dapat diabaikan.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) Kota Bekasi sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan kearsipan, menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya kepatuhan perangkat daerah terhadap pengelolaan arsip, keterbatasan infrastruktur penyimpanan, serta belum optimalnya penerapan sistem kearsipan digital. Di sisi lain, tuntutan terhadap efisiensi layanan publik dan percepatan transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menuntut sistem kearsipan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Strategi pengelolaan kearsipan dalam Renstra Disarpusda 2025–2029 disusun sebagai respons terhadap isu-isu tersebut, sekaligus sebagai arah kebijakan jangka menengah untuk mendorong perwujudan sistem kearsipan daerah yang modern, terstandar, dan terintegrasi. Pendekatan strategis ini juga diharapkan dapat meningkatkan nilai pengawasan kearsipan, memperkuat kapasitas SDM, serta menjamin tersedianya informasi arsip yang mudah diakses dan aman bagi seluruh pemangku kepentingan.

Dengan landasan tersebut, strategi pengelolaan kearsipan difokuskan pada penguatan tata kelola arsip dinamis dan statis, percepatan digitalisasi arsip berbasis sistem informasi, serta peningkatan koordinasi dan pembinaan antar-perangkat daerah agar sistem kearsipan Kota Bekasi mampu mendukung agenda reformasi birokrasi dan pembangunan berbasis data.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip daerah yang tertib, modern, dan berdaya guna, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi menetapkan strategi pengelolaan kearsipan yang berorientasi pada penguatan tata kelola, percepatan digitalisasi, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Strategi ini dikembangkan berdasarkan hasil evaluasi kinerja, identifikasi permasalahan aktual, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional.

Strategi pengelolaan kearsipan mencakup langkah-langkah berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Arsip Dinamis dan Statis

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan arsip sesuai standar nasional, seperti penetapan jadwal retensi arsip, klasifikasi arsip, dan penggunaan kode unit kerja. Disarpusda akan memperkuat peran pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan pengelolaan arsip aktif dan inaktif berjalan tertib, terencana, dan terdokumentasi.

2. Percepatan Digitalisasi Arsip dan Pemanfaatan Sistem Informasi

Dalam mendukung transformasi digital pemerintahan, strategi ini menekankan pada digitalisasi arsip berbasis prioritas layanan, khususnya arsip strategis dan arsip pelayanan publik. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) serta pengembangan e-Arsip Daerah akan menjadi instrumen utama dalam meningkatkan efisiensi penciptaan, penyimpanan, serta akses dan temu kembali arsip secara elektronik.

3. Peningkatan Kapasitas SDM dan Infrastruktur Kearsipan

Strategi ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan kompetensi dan jumlah tenaga pengelola arsip melalui pelatihan, sertifikasi arsiparis, serta penguatan struktur kelembagaan kearsipan pada OPD. Di samping itu, penyediaan sarana dan prasarana kearsipan seperti depo arsip, peralatan alih media, dan sistem keamanan arsip digital juga menjadi bagian dari prioritas penguatan kapasitas kelembagaan.

4. Penguatan Fungsi Pembinaan, Supervisi, dan Audit Kearsipan

Strategi ini menekankan peran Disarpusda sebagai pembina dan pengawas penyelenggaraan kearsipan di seluruh OPD. Pelaksanaan pengawasan internal, monitoring dan evaluasi kinerja kearsipan, serta pemberian asistensi teknis akan terus diintensifkan untuk meningkatkan nilai indeks pengawasan kearsipan serta membangun budaya tertib arsip di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

5. Peningkatan Kolaborasi dan Jejaring Layanan Kearsipan

Untuk memperkuat dukungan kelembagaan, Disarpusda akan mengembangkan kerja sama dengan instansi vertikal seperti Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Dinas Kearsipan Provinsi, serta lembaga pendidikan dan komunitas pemerhati sejarah. Kolaborasi ini ditujukan untuk penguatan peraturan, pelestarian arsip statis, dan peningkatan kesadaran publik terhadap pentingnya arsip.

Melalui strategi-strategi tersebut, diharapkan pengelolaan kearsipan di Kota Bekasi dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, berbasis data, serta mampu melindungi memori kolektif daerah sebagai bagian dari warisan dokumenter pembangunan dan peradaban.

Urusan Perpustakaan

Perpustakaan memegang peranan strategis sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat, pusat penyedia informasi, serta ruang inklusif yang mendorong peningkatan literasi dan kualitas sumber daya manusia. Dalam konteks pembangunan daerah, keberadaan perpustakaan yang dikelola secara profesional dan adaptif berkontribusi langsung terhadap tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pendidikan yang berkualitas, pengentasan kemiskinan informasi, dan penguatan budaya literasi masyarakat.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebagai penyelenggara urusan perpustakaan daerah menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya tingkat kegemaran membaca di sebagian kelompok masyarakat, keterbatasan akses layanan pustaka yang merata, serta masih perlunya inovasi dalam penyediaan layanan berbasis teknologi informasi dan inklusi sosial. Selain itu, ketimpangan kualitas pengelolaan perpustakaan sekolah dan perpustakaan komunitas menjadi perhatian penting dalam mendukung kesetaraan literasi di seluruh wilayah Kota Bekasi.

Dalam menjawab tantangan tersebut, strategi urusan perpustakaan dalam Rencana Strategis 2025–2029 dirumuskan sebagai upaya sistematis untuk meningkatkan daya jangkauan, relevansi, dan efektivitas layanan perpustakaan melalui transformasi model layanan, penguatan jejaring kelembagaan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM pustakawan. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam penguatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial serta mendukung tujuan RPJMD Kota Bekasi dalam meningkatkan daya saing dan budaya baca masyarakat.

Dengan landasan tersebut, strategi urusan perpustakaan akan difokuskan pada perluasan akses layanan, digitalisasi koleksi dan sistem, pengembangan perpustakaan ramah anak dan inklusif, serta integrasi layanan perpustakaan ke dalam ruang-ruang komunitas dan sektor pendidikan secara kolaboratif.

Adapun strategi pengembangan urusan perpustakaan yang ditetapkan dalam periode 2025–2029 meliputi:

1. Peningkatan Akses dan Pemerataan Layanan Perpustakaan

Strategi ini bertujuan untuk memperluas jangkauan layanan perpustakaan kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan wilayah dengan keterbatasan akses. Upaya dilakukan melalui penyediaan perpustakaan keliling, pengembangan perpustakaan mini di lingkungan RW/kelurahan, serta pemanfaatan ruang publik sebagai titik layanan baca masyarakat.

Langkah ini sejalan dengan prinsip literasi inklusif, yaitu memberikan hak akses yang setara terhadap sumber informasi bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi.

2. Transformasi Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Strategi ini mengedepankan penguatan fungsi perpustakaan sebagai pusat pemberdayaan masyarakat melalui program literasi yang kontekstual dengan kebutuhan warga. Kegiatan seperti pelatihan keterampilan, literasi digital, literasi finansial, hingga pendampingan UMKM kecil menjadi bagian dari transformasi layanan perpustakaan yang memberdayakan.

Melalui pendekatan ini, perpustakaan tidak hanya hadir sebagai tempat membaca, tetapi menjadi ruang tumbuh bagi penguatan kapasitas dan kemandirian masyarakat lokal.

3. Digitalisasi Layanan dan Koleksi Perpustakaan

Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan akses melalui integrasi sistem otomasi perpustakaan berbasis INLISLite, pengembangan katalog online, serta penyediaan koleksi digital (e-book, audio book, dan konten multimedia edukatif). Layanan perpustakaan virtual juga diperkuat dengan dukungan platform komunikasi seperti chatbot dan integrasi layanan berbasis WhatsApp.

Digitalisasi perpustakaan menjadi bagian penting dari transformasi digital pelayanan publik dan mendukung agenda Kota Bekasi menuju smart city.

4. Penguatan Perpustakaan Sekolah dan Komunitas

Strategi ini mendorong peningkatan kapasitas perpustakaan sekolah dan taman bacaan masyarakat (TBM) melalui pembinaan teknis, pelatihan

pustakawan/tenaga pengelola, serta fasilitasi koleksi dan alat bantu layanan. Kemitraan dengan Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan komunitas literasi menjadi bagian dari strategi kolaboratif yang memperluas dampak literasi di sektor pendidikan dan komunitas akar rumput.

5. Peningkatan Kualitas SDM dan Tata Kelola Perpustakaan

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan profesionalisme pengelola perpustakaan melalui pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi. Selain itu, penguatan regulasi internal, pedoman layanan, dan monitoring evaluasi akan mendukung terciptanya layanan perpustakaan yang bermutu, akuntabel, dan berkelanjutan.

Strategi-strategi tersebut dirancang untuk mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat” sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Renstra, serta mendukung langsung tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi, yaitu peningkatan daya saing SDM dan pembangunan masyarakat yang berbudaya dan informatif.

Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan merupakan upaya sistematis yang dilakukan setiap tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah secara bertahap dan terukur. Rencana ini disusun dengan memperhatikan skala prioritas, kebutuhan masyarakat, serta ketersediaan sumber daya yang ada. Secara garis besar, penahapan Renstra PD dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra Disarpusda

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Penguatan dasar dan infrastruktur kelembagaan; penyusunan regulasi, standar, dan kebijakan pendukung; pemetaan kebutuhan dan baseline kondisi perpustakaan dan	Pelaksanaan program prioritas; peningkatan akses layanan publik (perpustakaan dan arsip), pembangunan sarana fisik; awal implementasi e-arsip dan perpustakaan digital; peningkatan	Perluasan jangkauan layanan ke wilayah pinggiran dan kelompok rentan; optimalisasi fungsi perpustakaan di ruang publik; implementasi layanan arsip yang ramah pengguna serta	Konsolidasi program; evaluasi antara (mid-term) terhadap indikator kinerja utama; perbaikan layanan berdasarkan umpan balik masyarakat; peningkatan mutu layanan	Pencapaian target penuh indikator kinerja kunci (IPLM, akreditasi, IKM, e-arsip, dll.); persiapan kesinambungan menuju periode Renstra berikutnya; evaluasi akhir; penyusunan dokumen Renja tahun

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
kearsipan.	SDM melalui pelatihan.	pengawasan & akreditasi kearsipan lebih intensif.	berdasarkan standar akreditasi; penggunaan inovasi & teknologi yang lebih meluas.	2031 berdasarkan capaian dan pelajaran dari periode 2025-2030.

III.4 Arah Kebijakan Disarpusda

Arah kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian kerja strategis yang disusun untuk mengoperasionalisasikan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta selaras dengan arah kebijakan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029. Perumusan arah kebijakan ini bertujuan agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, khususnya pada urusan perpustakaan dan kearsipan, dapat terarah, terukur, dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan yang dirumuskan tidak hanya mendukung sasaran RPJMD tetapi juga memperkuat pencapaian indikator kinerja kunci nasional maupun daerah.

Teknik perumusan arah kebijakan Renstra PD dapat dijabarkan sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2025-2029

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disarpusda	Ket
1.	Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing masyarakat Kota Bekasi	Penguatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial, digitalisasi koleksi serta peningkatan akses literasi di ruang publik	Urusan Perpustakaan
2.	Akreditasi perpustakaan umum dan sekolah	Peningkatan mutu pendidikan yang merata dan inklusif	Fasilitasi akreditasi perpustakaan, pendampingan teknis dan pengembangan standar layanan	Urusan Perpustakaan
3	Pengelolaan arsip sesuai standar	Terwujudnya tata kelola pemerintahan	Peningkatan implementasi SIKD (Sistem Informasi	Urusan Kearsipan

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Disarpusda	Ket
	kearsipan nasional	yang efektif, akuntabel dan transparan	Kearsipan Daerah) serta penataan arsip dinamis dan statis	
4.	Pengawasan kearsipan	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Penguatan pembinaan pengawasan dan evaluasi kearsipan pada perangkat	Urusan Kearsipan
5.	Penyelamatan arsip dan naskah kuno	Penguatan identitas dan budaya lokal	Digitalisasi arsip/naskah kuno, preservasi serta akses publik berbasis teknologi	Urusan Kearsipan
6	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan perpustakaan dan kearsipan	Meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif dan memuaskan	Peningkatan kualitas layanan berbasis teknologi, ramah anak dan inklusif	Urusan Perpustakaan dan Kearsipan

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN

IV.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

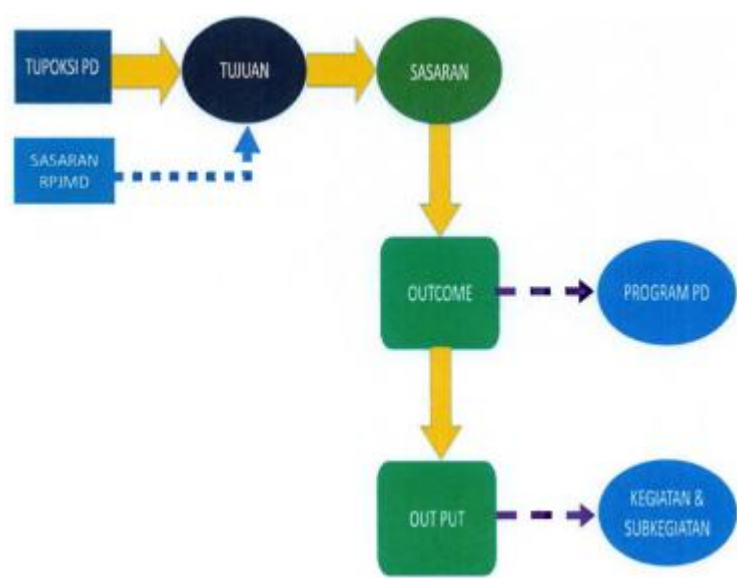
Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan instansi. Dalam rangka itu perlu diidentifikasi pula keterkaitan antara kebijakan yang telah ditetapkan dengan program dan kegiatan sebelum diimplementasikan. Kebijakan tersebut perlu dikaji terlebih dahulu untuk menyakinkan apakah kebijakan yang telah ditetapkan benar-benar dapat dilaksanakan.

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Dalam komponen kegiatan ini perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan dan rencana capaiannya.

Perumusan program, kegiatan dan subkegiatan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang kemudian diperbarui dengan beberapa kali Kepmendagri, dengan yang terakhir adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-2850 Tahun 2025 sebagai perubahan ketiga atas dasar hukum tersebut.

Adapun perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output, berdasarkan tugas fungsi dan sasaran RPJMD.

Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berikut perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029

Tabel 4.1 Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
Sasaran RPJMD : Terwujudnya pendidikan masyarakat yang berkualitas dan merata	Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan				Nilai Tingkat Kegemaran Membaca		
		Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat			Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			Outcome: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan		Indikator Outcome: Persentase penambahan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan	Program : Pembinaan Perpustakaan	
				Output: Terkelolanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemerataan Layanan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terbinanya Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	
				Output: Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
					Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
				Output: Tersusunnya Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	
				Output: Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	
				Output: Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan masyarakat rata- rata perhari	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat- Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	
			Outcome : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Output: Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Output: Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
			Outcome 2: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Output : Terlaksananya Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terkelolanya dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Output: Tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD sesuai NSPK	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Output : tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Output: Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Output: Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Output: Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Output: Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Output: Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD sesuai NSPK	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Output: Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Outcome 3: Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalita s Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Tersusunnya Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sesuai NSPK	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Output: Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Output: Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan sesuai NSPK	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Outcome 4: Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Output: Tersedianya Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
					Daerah yang disediakan		
				Output : Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Output: Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Output: Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Output: Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Output: Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
Sasaran RPJMD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah kota	Meningkatnya budaya membaca masyarakat dan mutu kearsipan				Indeks pengawasan kearsipan		
		Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan			Indeks tingkat digitalisasi arsip		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
			Outcome : Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Output: Terlaksananya Pengelolaan Arsip	Presentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	Program : Pengelolaan Arsip	
				Output: Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah pada audit sistem kearsipan internal	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	
				Output: Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terlaksananya Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	Penyusunan Database Arsiparis	
				Output: Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	Pemilihan Arsiparis Teladan	
				Output: Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	
				Output: Terlaksananya Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementas i pengelolaan arsip dinamis	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip statis yang sesuai dengan NSPK (Nilai pada aspek pengelolaan arsip statis pada audit sistem kearsipan eksternal)	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	
				Output: Terlaksananya Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	
				Output: Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada audit sistem kearsipan eksternal	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output: Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	
				Output: Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	
			Outcome : Meningkatnya perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai dengan NSPK		Persentase penambahan arsip statis pada depo arsip	Program : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	KE T
				Output : Terlaksananya Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah rekomendasi prosedur pemusnahan arsip daerah sesuai dengan NSPK	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	
				Output : Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	
				Output : Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	Jumlah arsip keluarga yang di enkapsulasi	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	
				Output : Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	

Sumber : Perencanaan Disarpusda Tahun 2025

Sebagai upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah, maka program, kegiatan, dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2025–2030 disusun secara berkelanjutan mulai tahun 2025 hingga tahun 2030. Khusus untuk tahun 2030, program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan merupakan bagian dari strategi untuk menjamin keberlanjutan capaian kinerja, sekaligus menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Arsip dan Perpustakaan Tahun 2030. Dengan demikian, program tahun 2030 bukan merupakan perencanaan yang terpisah, melainkan bagian integral dari kerangka Renstra yang memastikan arah pembangunan urusan perpustakaan dan kearsipan tetap konsisten, terukur, dan berkesinambungan sesuai dengan visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi setiap tahunnya dari Tahun 2025-2030 secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR PROGRAM, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2025-2030

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
PERPUSTAKAAN															
Program : Pembinaan Perpustakaan															
Outcome:	Indikator Outcome:	100 Perpust akaan	10% (110 Perpust akaan)	1.516.68 6.160	10%	1.920.09 8.000	10%	2.019.55 9.076	10%	2.135.88 5.679	10%	2.245.24 3.026	10%	2.365.58 8.052	
Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase penambahan perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan				(121 Perpust akaan)		(133 Perpust akaan)		(146 Perpust akaan)		(160 Perpust akaan)		(176 Perpust akaan)		
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemerataan Layanan Perpustakaan				739 Perpusta kaan		740 Perpusta kaan		741 Perpusta kaan		742 Perpusta kaan		743 Perpusta kaan		
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				5 Perpusta kaan		5 Perpusta kaan		5 Perpusta kaan		5 Perpusta kaan		5 Perpusta kaan		

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	1 Perpust akaan	1 Perpusta kaan	220.000.0 00	1 Perpusta kaan	100.000.0 00	1 Perpusta kaan	105.000.0 00	1 Perpusta kaan	115.000.0 00	1 Perpusta kaan	125.000.0 00	1 Perpusta kaan	135.000.0 00	
Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kot a	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangankabupat en/kota dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	N/A	0	0	1 Perpusta kaan	70.000.00 0	1 Perpusta kaan	75.000.00 0	1 Perpusta kaan	85.000.00 0	1 Perpusta kaan	95.000.00 0	1 Perpusta kaan	105.000.0 00	
Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	N/A	0	0	6000 Eksempl ar	101.714.0 00	6100 Eksempl ar	110.000.0 00	6200 Eksempl ar	120.000.0 00	6300 Eksempl ar	130.000.0 00	6400 Eksempl ar	140.000.0 00	
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 Orang	150 Orang	236.935.0 00	70 Orang	150.000.0 00	75 Orang	155.000.0 00	85 orang	165.000.0 00	95 orang	175.000.0 00	105 orang	185.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	2 Dokume n	2 Dokume n	69.835.00 0	2 Dokume n	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.0 00	2 Dokume n	200.000.0 00	
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	3007 Eksempl ar	1200 Eksempl ar	120.000.0 00	1700 Eksempl ar	170.100.0 00	1800 Eksempl ar	180.000.0 00	1900 Eksempl ar	190.000.0 00	2000 Eksempl ar	200.000.0 00	2100 Eksempl ar	210.000.0 00	
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	1 Layanan	1 Layanan	119.932.0 00	1 Layanan	149.540.0 00	1 Layanan	155.000.0 00	1 Layanan	165.000.0 00	1 Layanan	175.000.0 00	1 Layanan	185.000.0 00	
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah kunjungan masyarakat rata-rata perhari	1641	1643	599.380.1 60	1645	828.744.0 00	1647	884.559.0 76	1649	930.885.6 79	1651	970.243.0 26	1653	1.020.588 .052	
Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kot a	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	14 orang	0	-	14 orang	200.000.0 00	14 orang	210.000.0 00	14 orang	220.000.0 00	14 orang	230.000.0 00	14 orang	240.000.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	3 Perpust akaan	3 Perpusta kaan	125.000.0 00	3 Perpusta kaan	150.000.0 00	3 Perpusta kaan	160.000.0 00	3 Perpusta kaan	170.000.0 00	3 Perpusta kaan	180.000.0 00	3 Perpusta kaan	190.000.0 00	
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	3 Perpust akaan	3 Perpusta kaan	200.666.1 60	3 Perpusta kaan	278.744.0 00	3 Perpusta kaan	304.559.0 76	3 Perpusta kaan	320.885.6 79	3 Perpusta kaan	330.243.0 26	3 Perpusta kaan	350.588.0 52	
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	1 Lokus	4 Lokus	273.714.0 00	3 Lokus	200.000.0 00	4 Lokus	210.000.0 00	4 Lokus	220.000.0 00	4 Lokus	230.000.0 00	4 Lokus	240.000.0 00	
KEARSIPAN															
Program : Pengelolaan Arsip															
Outcome : Meningkatkan tata kelola arsip dinamis dan statis	Presentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	54.54% (24 OPD)	56,81 (25 OPD)	1.143.809 .000	59,09 (26 OPD)	900.000.0 00	61,36 (27 OPD)	946.000.0 00	63.63% (28 OPD)	1.001.145 .312	65.9% (29 OPD)	1.052.403 .952	68.18 (30 OPD)	1.108.812 .804	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Nilai pengelolaan arsip dinamis di perangkat daerah pada audit sistem kearsipan internal	36,74	36,84	263.263.000	36,94	500.000.000	37,04	546.620.000	37,14	601.145.312	37,24	652.403.952	37,34	708.812.804	
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1 Naskah	0			0		0	1 Naskah	20.000.000	1 Naskah	20.000.000	1 Naskah	20.000.000	
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	139.536.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	220.000.000	
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	1	0	0	0	0	1	26.620.000	1	61.145.312	1	65.000.000	1	48.812.804	
Penyusunan Database Arsiparis	Jumlah arsiparis	0	0	-	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	
Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	0	1	123.727.000	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000	
Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	0	0	-	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	232.403.952	12	130.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	0	0	-	44	100.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	44	100.000.000	
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pencipta arsip yang telah menyerahkan arsip statis yang sesuai dengan NSPK (Nilai pada aspek pengelolaan arsip statis pada audit sistem kearsipan eksternal)	22 OPD (24,68)	24,78	123.727.000	24,88	100.000.000	24,98	100.000.000	25,08	100.000.000	25,18	100.000.000	25,28	100.000.000	
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	0	50	123.727.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	50	100.000.000	
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Nilai Tingkat Digitalisasi Arsip pada audit sistem kearsipan eksternal	93	93,01	258.500.000	93,02	300.000.000	93,03	300.000.000	93,04	300.000.000	93,05	300.000.000	93,06	300.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	7 pengguna	10	93.000.000	13	100.000.000	16	100.000.000	19	100.000.000	22	100.000.000	25	100.000.000	
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	1	165.500.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	
Program : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip															
Outcome : Meningkatkan perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan NSPK	Persentase penambahan arsip statis pada depo arsip	8,7% (403 Boks)	400%	179.991.750	10%	200.000.000	10%	210.360.000	10%	222.476.736	10%	233.867.545	10%	246.402.845	
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah rekomendasi prosedur pemusnahan arsip daerah sesuai dengan NSPK	3		149.991.750	5	0	6	10.360.000	7	22.476.736	8	33.867.545	9	46.402.845	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan			149.991.750		0	100	10.360.000	200	22.476.736	300	33.867.545	400	46.402.845	
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kot a	Jumlah arsip keluarga yang di enkapsulasi	30	50	30.000.000		200.000.000	90	200.000.000	110	200.000.000	130	200.000.000	150	200.000.000	
Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	30	50	30.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	50	200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				14.655.935.560		15.067.149.990		15.567.149.990		15.675.862.850		15.989.380.107		16.309.176.709	
	Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100%	100%	110.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	Dokumen	6 Dokumen	105.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	175.000.000	5 Dokumen	175.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	2 Dokumen	160.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	20.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	3 Laporan	15.000.000	
	Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	87,36%	87,46%	12.568.845.080	87,56%	13.142.149.990	87,66%	13.642.149.990	87,76%	13.750.862.850	87,86%	14.064.380.107	87,96	14.384.176.709	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	3 Laporan	3 Laporan	11.095.927.000	4 Laporan	11.460.512.080	4 Laporan	11.785.512.080	4 Laporan	11.884.224.940	4 Laporan	12.192.742.197	4 Laporan	12.507.538.799	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.146 orang/bulan	1.146 orang/bulan	11.075.927.000	1,200 orang/bulan	11.440.512.080	1,200 orang/bulan	11.765.512.080	1,200 orang/bulan	11.864.224.940	1,200 orang/bulan	12.172.742.197	1,200 orang/bulan	12.487.538.799	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	0	0	0	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	5.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	18 laporan	10.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	8 Laporan	8 Laporan	650.000.000	8 Laporan	615.000.000	8 Laporan	790.000.000	8 Laporan	800.000.000	8 Laporan	805.000.000	8 Laporan	810.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	40.000.00 0	1 paket	40.000.00 0	1 paket	60.000.00 0	1 paket	65.000.00 0	1 paket	65.000.00 0	1 paket	65.000.00 0	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.00 0	1 paket	30.000.00 0	1 paket	35.000.00 0	1 paket	40.000.00 0	1 paket	45.000.00 0	1 paket	50.000.00 0	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	250.000.0 00	3 paket	200.000.0 00	3 paket	300.000.0 00	3 paket	300.000.0 00	3 paket	300.000.0 00	3 paket	300.000.0 00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	50.000.00 0	2 paket	50.000.00 0	2 paket	50.000.00 0	2 paket	50.000.00 0	2 paket	50.000.00 0	2 paket	50.000.00 0	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	2 dokume n	2 dokume n	30.000.00 0	2 dokume n	50.000.00 0	2 dokume n	50.000.00 0	2 dokume n	50.000.00 0	2 dokume n	50.000.00 0	2 dokume n	50.000.00 0	
Fasilitasi Kunjungan Tamud	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamud	12 laporan	12 laporan	15.000.00 0	12 laporan	15.000.00 0	12 laporan	15.000.00 0	12 laporan	15.000.00 0	12 laporan	15.000.00 0	12 laporan	15.000.00 0	
Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	200.000.0 00	12 laporan	200.000.0 00	12 laporan	250.000.0 00	12 laporan	250.000.0 00	12 laporan	250.000.0 00	12 laporan	250.000.0 00	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokume n	1 dokume n	35.000.00 0	1 dokume n	30.000.00 0	1 dokume n	30.000.00 0	1 dokume n	30.000.00 0	1 dokume n	30.000.00 0	1 dokume n	30.000.00 0	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai NSPK	24 laporan	24 laporan	1.066.63 7.910	24 laporan	1.066.63 7.910	24 laporan	867.980. 910	24 laporan	1.066.63 7.910	24 laporan	1.066.63 7.910	24 laporan	1.066.63 7.910	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	279.000.0 00	12 laporan	279.000.0 00	12 laporan	279.000.0 00	12 laporan	279.000.0 00	12 laporan	279.000.0 00	12 laporan	279.000.0 00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	787.637.9 10	12 laporan	787.637.9 10	12 laporan	588.980.9 10	12 laporan	787.637.9 10	12 laporan	787.637.9 10	12 laporan	787.637.9 10	
	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	81,44	81,45	67.500.0 00	81,46	250.000. 000	81,47	250.000. 000	81,48	250.000. 000	81,49	250.000. 000	81,5	250.000. 000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun sesuai NSPK	1 laporan	1 laporan	67.500.00 0	1 laporan	250.000.0 00	1 laporan	250.000.0 00	1 laporan	250.000.0 00	1 laporan	250.000.0 00	1 laporan	250.000.0 00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanny a	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	0	1 Paket	125.000.0 00	1 Paket	122.500.0 00	1 Paket	122.500.0 00	1 Paket	122.500.0 00	1 Paket	122.500.0 00	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	10 Orang	67.500.000	14 orang	125.000.000	15 Orang	127.500.000	15 Orang	127.500.000	15 Orang	127.500.000	15 Orang	127.500.000	
	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	80%	80%	1.132.140.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	80%	1.500.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	450.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	0	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	10 unit	100.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 unit	43 unit	350.000.000	20 unit	350.000.000	20 unit	350.000.000	20 unit	350.000.000	20 unit	350.000.000	20 unit	350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang dipelihara	4 Laporan	4 Laporan	782.140.000	4 Laporan	1.050.000.000	4 Laporan	1.050.000.000	4 Laporan	1.050.000.000	4 Laporan	1.050.000.000	4 Laporan	1.050.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	6 unit	6 unit	230.000.000	6 unit	350.000.000	6 unit	350.000.000	6 unit	350.000.000	6 unit	350.000.000	6 unit	350.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	BASELI NE 2024	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN												K E T
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya														
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 unit	15 unit	232.140.0 00	15 unit	250.000.0 00	15 unit	250.000.0 00	15 unit	250.000.0 00	15 unit	250.000.0 00	15 unit	250.000.0 00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	164 unit	164 unit	120.000.0 00	164 unit	150.000.0 00	164 unit	150.000.0 00	164 unit	150.000.0 00	164 unit	150.000.0 00	164 unit	150.000.0 00	
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabi litasi	1 unit	1 unit	200.000.0 00	1 unit	300.000.0 00	1 unit	300.000.0 00	1 unit	300.000.0 00	1 unit	300.000.0 00	1 unit	300.000.0 00	

Sumber : Data diolah Sub Bagian Perencanaan Disarpusda Kota Bekasi, 2025

IV.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi Tahun 2025-2029, telah dirumuskan 7 (tujuh) program prioritas Pembangunan daerah “Sapta Program Kota Bekasi Keren” antara lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Publik Kesehatan, Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE SEHAT);
2. Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS);
3. Peningkatan Kualitas Hidup Manusia dan Kehidupan Kota yang Ramah Lingkungan (Diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE HIJAU);
4. Peningkatan Perluasan Lapangan Pekerjaan yang Inklusif Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKARYA);
5. Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Daya Tarik Investasi Pembangunan di Kota Bekasi (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE MENARIK);
6. Penguatan Kohesi Sosial dalam Kehidupan Beragama dan Berbudaya (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERSINERGI);
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Kota dan Penguatan Sistem Manajemen Pendukung (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE BERKINERJA).

Dalam mendukung program prioritas Pembangunan daerah tersebut, Dispusipda Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan prioritas sebagai berikut:

Tabel 4.3
Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Program Pembinaan Perpustakaan	Outcome: Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar	Kegiatan: Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah/Kota	Mendukung prioritas Peningkatan Jangkauan dan Mutu Pelayanan

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		nasional perpustakaan	Subkegiatan: Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pendidikan Dasar dan Menengah (diperkenalkan sebagai semangat pembaharuan dengan spirit Program GERAKAN KOBE CERDAS)

Dalam rangka mendukung pencapaian “Gerakan KOBE CERDAS”, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi melaksanakan sub kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota. Sub kegiatan ini diarahkan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang ramah anak melalui penyediaan ruang literasi yang aman, nyaman, dan inklusif di berbagai titik strategis seperti taman kota, alun-alun, ruang publik, serta fasilitas umum lainnya. Keberadaan sarana perpustakaan di ruang publik ini diharapkan mampu menjadi wahana belajar sepanjang hayat yang ramah anak, sekaligus mendukung tumbuh kembang anak usia dini serta memberikan akses pendidikan nonformal bagi anak berkebutuhan khusus.

Selain menyediakan fasilitas fisik yang memadai, pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum juga ditujukan agar layanan literasi dapat berkelanjutan dan adaptif dengan kebutuhan masyarakat. Perpustakaan di ruang publik akan dilengkapi dengan bahan bacaan yang sesuai usia, koleksi inklusif, serta fasilitas pendukung ramah disabilitas untuk memastikan semua anak dapat memperoleh manfaat secara setara. Dengan demikian, sub kegiatan ini tidak hanya memperluas akses informasi dan pengetahuan, tetapi juga memperkuat peran Kota Bekasi sebagai kota yang mendukung pendidikan anak sejak usia dini, sekaligus memberikan ruang interaksi sosial yang sehat bagi anak dan keluarga.

Melalui langkah ini, Disarpusda berkontribusi nyata dalam mendukung sasaran “Gerakan KOBE CERDAS”, yakni terbangunnya Kota Bekasi yang ramah anak dan mampu memfasilitasi pendidikan inklusif bagi seluruh anak tanpa terkecuali.

4.3 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bagian penting dalam proses penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk

mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah selama lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029. Target indikator kinerja ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi, penetapan target kinerja lima tahunan disusun secara sistematis dan terukur melalui pendekatan indikator kinerja yang merupakan instrumen utama dalam sistem perencanaan kinerja pemerintah daerah yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Penetapan indikator kinerja berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mengacu pada kebijakan nasional, RPJMD Kota Bekasi 2025-2029, serta dokumen NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait. Indikator-indikator ini ditetapkan secara kuantitatif, relevan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dan dapat dievaluasi secara periodik melalui sistem pemantauan kinerja daerah.

Dalam konteks Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah, indikator kinerja yang ditetapkan mencerminkan capaian penyelenggaraan urusan perpustakaan dan kearsipan yang terfokus pada peningkatan literasi masyarakat, perbaikan kualitas layanan perpustakaan, serta perwujudan pengelolaan arsip daerah yang modern dan akuntabel.

Target-target indikator kinerja disusun untuk periode lima tahun (2025–2029) dengan mempertimbangkan:

- Capaian kinerja historis pada periode sebelumnya (2020–2024),
- Analisis sumber daya dan kapasitas kelembagaan,
- Tren perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan informasi,
- Serta kontribusi terhadap sasaran pembangunan daerah dan indikator kinerja utama (IKU) RPJMD.

Dengan penetapan target kinerja melalui indikator kinerja ini, diharapkan setiap program dan kegiatan Disarpusda dapat terarah pada output dan outcome yang berdampak nyata terhadap masyarakat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang berbasis data, inklusif, dan berorientasi hasil.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Disarpusda dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59.46	59.56	59.66	59.76	59.86	59.96	
2	Indeks tingkat digitalisasi arsip	Nilai	93,1	93,2	93,3	93,4	93,5	93,6	

Adapun formulasi perhitungan indikator sasaran yang menjadi indikator kinerja utama (IKU) Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Formulasi Perhitungan IKU Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2030

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Mutu Penyelenggaraan Kearsipan	1 Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	Tingkat digitalisasi arsip merupakan indikator penting dalam mengukur kemajuan tata kelola kearsipan yang modern, efektif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dalam Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Elektronik (PADE) menyebutkan digitalisasi arsip dipandang sebagai upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pelayanan publik serta penyelenggaraan pemerintahan.	Menggunakan instrumen Audit Pengelolaan Arsip Elektronik (APAE) dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang menilai aspek digitalisasi, implementasi aplikasi, serta sumber daya pendukungnya.	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Dan Informasi Kearsipan 2 Bidang Kearsipan
2	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator kinerja kunci outcome urusan perpustakaan dimana mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam membina dan	Dimensi Instrumen IPLM terdiri dari: 1. Dimensi Kepatuhan/Compliance Jumlah koleksi tercetak Jumlah koleksi elektronik	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Preservasi Bahan Perpustakaan

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Penambahan koleksi tercetak dalam satu tahun terakhir Jumlah Penambahan koleksi elektronik dalam satu tahun terakhir Jumlah pustakawan sesuai kualifikasi pendidikan Jumlah tenaga teknis perpustakaan Jumlah tenaga perpustakaan yang mengikuti PKB 2. Dimensi Kinerja/Performance (satu tahun terakhir) Jumlah Koleksi tercetak yang dimanfaatkan Jumlah Koleksi elektroik yang dimanfaatkan Jumlah Masyarakat yang mengikuti kegiatan penguatan baca dan peningkatan literasi Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan secara luring/daring		2 Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca

NO .	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUA N	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan fasilitas sarana TIK Jumlah kegiatan penguatan budaya baca dan literasi Jumlah kolaborasi dan kerjasama perpustakaan Jumlah variasi dan layanan yang tersedia Jumlah dokumen kebijakan dan prosedur layanan		

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan tolok ukur utama yang ditetapkan secara nasional untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 mengenai Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. IKK menjadi instrumen penting dalam mengukur kinerja karena bersifat standar, terukur, dan berlaku secara nasional sehingga dapat digunakan sebagai dasar perbandingan capaian antar daerah maupun terhadap target nasional.

Untuk urusan perpustakaan, indikator kinerja kunci yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM). Kedua indikator ini menggambarkan kondisi literasi masyarakat baik dari sisi ketersediaan infrastruktur, koleksi, tenaga pustakawan, serta tingkat partisipasi dan perilaku membaca masyarakat. Pencapaian indikator ini menjadi gambaran nyata efektivitas program dan kegiatan pengembangan perpustakaan daerah dalam meningkatkan literasi masyarakat.

Sedangkan untuk urusan kearsipan, indikator kinerja kunci yang digunakan antara lain Indeks Pengawasan Kearsipan. Indikator tersebut menjadi ukuran tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyelenggarakan tata kelola kearsipan sesuai standar nasional, termasuk aspek kelembagaan, sumber daya manusia, sarana prasarana, serta pemanfaatan teknologi informasi kearsipan.

Dengan menggunakan indikator kinerja kunci tersebut, perangkat daerah memiliki acuan yang jelas dalam menetapkan target kinerja, menyusun strategi pencapaian, sekaligus mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Keberhasilan pencapaian IKK juga menjadi bagian dari kontribusi Dinas Arsip dan Perpustakaan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan masyarakat yang literat, tertib arsip, dan berdaya saing. Adapun target IKK Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2025-2029

N O	INDIKATO R	SATUA N	Baseli ne 2024	TARGET						KE T
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
1	Nilai Tingkat Kegemaran	Nilai	76.92	77.0 2	77.1 2	77.2 2	77.3 2	77.4 2	77.5 2	

N O	INDIKATO R	SATUA N	Baseli ne 2024	TARGET						KE T
				202 5	202 6	202 7	202 8	202 9	203 0	
	Membaca Masyarakat									
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59.36	59.46	59.56	59.66	59.76	59.86	59.96	
3	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	85,16	85.26	85.36	85.46	85.56	85.66	85.76	

Keterkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bekasi

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029, Disarpusda mendukung penanggulangan kemiskinan dimana salah satu strateginya adalah pengurangan beban pengeluaran dengan salah satu arah kebijakannya yaitu pengurangan beban pengelurran pendidikan dan peningkatan akses pendidikan. Adapun program dukungan Disarpusda Kota Bekasi terhadap penanggulangan kemiskinan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Penanggulangan dan Pengentasan Kemiskinan

NO	STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KET
1	Pengurangan Beban Pengeluaran	Program Pembinaan Perpustakaa n	Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	

Keterkaitan dengan Jabar Istimewa

Berdasarkan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025–2029, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (Disarpusda) memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian visi pembangunan Provinsi Jawa Barat yang dituangkan dalam program “Jawa Barat Istimewa”. Salah satu agenda utama Jawa Barat Istimewa adalah “Langkah Katilu: Pendidikan Istimewa melalui pengembangan pendidikan berkarakter”.

Dalam konteks ini, Disarpusda Kota Bekasi memberikan kontribusi melalui penguatan ekosistem literasi yang mendukung terbentuknya masyarakat pembelajar sepanjang hayat. Program-program yang dilaksanakan Disarpusda, seperti penyediaan sarana prasarana perpustakaan di ruang

publik, pengembangan layanan berbasis digital, pembinaan perpustakaan sekolah, serta fasilitasi kegiatan literasi masyarakat, merupakan bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan pendidikan berkarakter.

Dengan demikian, keterkaitan program dan kegiatan Disarpusda dengan agenda “Jawa Barat Istimewa” bukan hanya sebatas mendukung peningkatan kualitas pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa generasi muda Kota Bekasi tumbuh dengan akses yang luas terhadap informasi, budaya membaca, serta kesadaran akan pentingnya arsip sebagai identitas dan memori kolektif daerah. Hal ini sejalan dengan misi Jawa Barat dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di tingkat regional maupun nasional. Adapun program dukungan Disarpusda Kota Bekasi terhadap pencapaian Jawa Barat Istimewa sebagai berikut:

Tabel 4.8

Program Dukungan Kota Bekasi Terhadap Pencapaian Jabar Istimewa

JABAR ISTIMEWA	PROGRAM KOTA BEKASI	PAGU INDIKATIF TAHUN						PD
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Pendidikan Istimewa (pendidikan berkarakter, ruang kelas baru, beasiswa)	Program Pembinaan Perpustakaan	1.516	1.920	2.019	2.135	2.245	2.236	DISARPUSDA

Program Perangkat Daerah

Program dan kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan instrumen pelaksanaan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Penyusunan program dan kegiatan ini berpedoman pada kebijakan pembangunan daerah, selaras dengan kebijakan nasional, serta berlandaskan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah berkontribusi langsung dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah, sekaligus memperkuat peran Kota Bekasi dalam pencapaian target pembangunan Provinsi Jawa Barat dan tujuan pembangunan nasional. Adapun program Disarpusda Tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.9 Indikator Kinerja Program Disarpusda yang Mengacu pada
RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2030**

No	Program / Outcome	Indikator	Realisasi 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH										
1	Maningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	Persentase keselarasan perencanaan perangkat daerah dengan penganggaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatnya capaian kinerja keuangan penunjang urusan	Persentase capaian kinerja keuangan penunjang urusan	87,36%	87,46%	87,56%	87,66%	87,76%	87,86%	87,96%	100%
3	Meningkatnya nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah	81,35	81,45	81,46	81,47	81,48	81,49	81,50	81,5
4	Meningkatnya pengelolaan barang milik	Persentase pengelolaan barang milik daerah yang akuntabel	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%

No	Program / Outcome	Indikator	Realisasi 2024	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	daerah yang akuntabel									
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP										
1	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai dengan NSPK	Persentase Penambahan arsip statis pada depo arsip	(8,7%) 403 Boks	10% (443 Boks)	10% (487 Boks)	10% (535 Boks)	10% (588 Boks)	10% (646 Boks)	10% (710 Boks)	10% (710 Boks)
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP										
1	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib	54,54% (24 OPD)	56,81 (25 OPD)	59,09% (26 OPD)	61,36% (27 OPD)	63,63% (28 OPD)	65,9 (29 OPD)	68,18 (30 OPD)	68,18 (30 OPD)
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN										
1	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Persentase penambahan perpustakaan yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP)	10% (100 Perpustakaan)	10% (110 Perpustakaan)	10% (121 Perpustakaan)	10% (133 Perpustakaan)	10% (146 Perpustakaan)	10% (160 Perpustakaan)	10% (156 Perpustakaan)	1580

BAB V

PENUTUP

Renstra ini merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program dan indikator kinerja perangkat daerah yang dijabarkan dari dokumen RPJMD Kota Bekasi. Secara substansial, dokumen ini menggambarkan komitmen perangkat daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, khususnya dalam penguatan budaya literasi masyarakat, peningkatan kualitas layanan perpustakaan, serta pengelolaan arsip yang tertib, akuntabel, dan berbasis digital.

Pelaksanaan Renstra ini akan mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan menjunjung tinggi asas efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi. Setiap program dan kegiatan akan dilaksanakan sesuai kaidah pelaksanaan yang telah direncanakan, melalui pendekatan berbasis hasil (result-based planning), serta mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan kemampuan kelembagaan.

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra akan dilakukan secara berkala melalui mekanisme monitoring, evaluasi kinerja, dan pelaporan tahunan serta lima tahunan. Evaluasi ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan dan penyesuaian program agar tetap relevan dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Dengan penyusunan Renstra ini, diharapkan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian visi pembangunan daerah, serta memperkuat posisi perpustakaan dan kearsipan sebagai sektor strategis dalam mendukung pencerdasan kehidupan bangsa dan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis informasi.

Bekasi, 19 September 2025

Plt. KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
DAERAH KOTA BEKASI



Ir. LUSIANA, M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 196809201995032002